

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL PADA
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

Oleh

PARHIMPUNAN
10975006872



**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
PEKANBARU
2013**

ABSTRAK

ANALIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROKAN HULIU

OLEH : PARHIMPUNAN

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu, Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat,. Upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah yaitu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah. Salah satu pajak yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan hulu yaitu pajak hotel, penulis melihat adanya gejala-gejala, lemahnya penerapan sistem prosedur pemungutan pajak hotel yang kurang sesuai dengan peraturan Bupati No 26 Tahun 2011 tentang pemungutan pajak hotel. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Penerimaan Pajak Ditinjau dari Sistem Prosedur Pemungutan Pajak Hotel Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Penerimaan Pajak Ditinjau dari Sistem Prosedur Pemungutan Pajak Hotel Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu. Penggunaan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan tehnik proposive sampling dimana yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 17 orang. Sumber data dalam penelitian ini berdasarkan data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan kuisisioner, Untuk menganalisa penelitian ini peneliti melakukan pendekatan secara deskriptif kualitatif. Setelah dilakukan analisa hasil penerimaan pajak hotel di Kabupaten Rokan Hulu, dapat dikatakan bahwa prosedur pemungutan pajak telah berjalan dengan baik dengan menggunakan system self assessment, akan tetapi pengawasan pada system ini perlu ditekankan oleh pihak dinas terkait untuk lebih mendapatkan kejujuran pembayaran oleh wajib pajak. adapun penyebab kenaikan dan penurunan pendapatan dari sektor pajak hotel ini dikarenakan grafik penyewa jasa hotel yang sering naik turun.

Kata kunci : Pajak hotel, prosedur pemungutan pajak hotel, penerimaan pajak dan jumlah penyewa jasa hotel.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, wr.wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya berupa keimanan, kesempatan, kesehatan dan kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Analisis Penerimaan Pajak Hotel Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu”**.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat wajib guna memperoleh gelar sarjana pada jurusan Administrasi Negara di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam proses pembuatan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan baik dari segi referensinya, keterbatasan data maupun keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis, tetapi akhirnya semua hambatan itu Alhamdulillah dapat teratasi. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pembantu rektor I, II, III, IV yang telah memberi waktu kepada peneliti untuk menuntut ilmu di Perguruan Tinggi ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Bapak Mahendra Romus, M.Ec, PhD beserta staf fakultas ekonomi dn ilmu sosial yang telah memberikan kemudahan dalam proses administrasi dalam rangka penyelesaian skripsi ini dan kesuksesan mahasiswanya.

3. Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara dan Bapak Rusdi, S.sos, M.Si selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan bantuan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Afrinaldi S.ip, M.Si selaku dosen konsultasi dan Ibu Ikhwan Ratna SE, M.Si selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah berkenan meluangkan waktu, mengarahkan, membimbing dan mendorong penyempurnaan skripsi serta dengan sabar berkenan mengoreksi skripsi ini hingga dapat diselesaikan penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial yang telah memberikan pelajaran berupa ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Bapak Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu beserta pegawai yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.
7. Kepada Almarhum Ayahanda tersayang Irpan Nasution dan Ibunda Asro tercinta yang menjadi semangat terbesar penulis dalam proses pembuatan skripsi ini dan atas segala kasih sayang perhatian dan dorongan yang diberikan yang tidak bertepi. Untuk ayah, kami rindu ayah mudah-mudahan pengorbanan ayah selama ini akan menjadi motivasi khusus bagi anak-anak ayah untuk mencapai kesuksesan, dan ayah tenang di alam sana dan di terima di sisi Allah SWT, Amin.
8. Kepada Abang Robinson Nst S.sos dan Kakak Nurhasanah S.far serta adik-adik ku Muhammad Rin dan Roselinda yang senantiasa memberikan motivasi dan bantuan baik moral dan materil kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Sahabat-sahabat penulis Romy Syafiril, Rizki Saragih, Merialita S.Ap, Adna Elfitri, Fitri Apriliana, Rosi Andela S.Ap, M Khosiin, Indra Gunawan, Nanda Sirfana, Juliansyah, Helmi, Khairul Syaifuddin, M Ridho, dan semua teman angkatan Administrasi Negara 2009 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, yang senantiasa bersama baik suka, duka dan selalu meluangkan waktu untuk membantu dengan tulus.
10. Kepada yang tersayang Misriani yang juga ikut memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, selanjutnya, Febriyani, Fitria, Efrina(Una), Artaty, teman-teman KKN Desa Pujud Kabupaten Rokan Hilir yaitu Mas Bro Sugiono, Mulyadi, Zainul Ngibad, Heriansyah, Partahian Siregar, Riska Abdullah, Tri Utami, Ira Maya Sofiana. Kemudian untuk teman-teman kos, Aldi, Yeni, Oji, Ibeng, Adefra, Rahman, yang telah memberikan semangat, dorongan dan bantuan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini dan telah menjadi keluarga tempat berbagi cerita bagi penulis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal pada semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari hasil pembahasan ini tidak luput dari keterbatasan, baik dari segi ketajaman analisa maupun cakupan ruang lingkupnya dan jauh dari kata sempurna, karena yang sempurna hanya milik Allah SWT semata.

Pekanbaru, Mei 2013

Parhimpunan
NIM. 10975006872

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Perumusan Masalah | 13 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 13 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 13 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 14 |
| BAB II TELAAH PUSTAKA | 16 |
| 2.1 Pengertian Pajak | 16 |
| 2.2 Pengertian Hotel | 20 |
| 2.3 Pajak Hotel | 22 |
| 2.4 Pengertian Penerimaan | 24 |
| 2.5 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset | 33 |
| 2.6 Defenisi Konsep | 34 |
| 2.7 Konsep Operasional | 36 |
| 2.8 Penelitian Terdahulu | 41 |
| 2.9 Hipotesis..... | 42 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 43 |
| 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian | 43 |
| 3.2 Jenis dan Sumber Data | 43 |
| 3.3 Populasi dan Sampel | 44 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data | 45 |
| 3.5 Teknik Analisis Data | 45 |

| | |
|---|---------------|
| BAB IV GAMBARAN UMUM..... | 47 |
| 4.1 Deskripsi Umum Ruang Lingkup Penelitian | 47 |
| 4.2 Struktur Dinas Pengelolaan Keuangan dan aset..... | 47 |
| 4.3 Kondisi Kepegawaian | 53 |
| 4.4 Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Keuangan danAset Kabuapten Rokan Hulu..... | 53 |
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 55 |
| 5.1 Identitas Responden | 55 |
| 5.5.1 Jenis Kelamin | 55 |
| 5.5.2 Tingkat Usia/Umur..... | 56 |
| 5.5.3 Tingkat Pendidikan | 57 |
| 5.2 Prosedur Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hulu . | 58 |
| 5.2.1 Pendaftaran dan Pendataan | 58 |
| 5.2.2 Penempatan dan Pemungutan | 62 |
| 5.2.3 Penagihan | 67 |
| 5.2.4 Pembukuan dan Pemeriksaan..... | 71 |
| 5.2.5 Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian | 76 |
| BAB VI PENUTUP | 82 |
| 6.1 Kesimpulan | 82 |
| 6.2 Saran..... | 83 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Telah dimaklumi bersama, bahwa pembangunan daerah telah dicanangkan pemerintah adalah merupakan suatu kesatuan yang utuh dan Pembangunan Nasional serta menciptakan landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia umumnya dan masyarakat daerah pada khususnya, sehingga daerah dapat tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsa dan potensi dimilikinya sendiri seiring dengan konsep otonomi.

Dimana tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan roda pemerintahan dalam rangka pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Sesuai dengan prinsip yang diterapkan dalam pemberian otonomi kepada daerah yaitu otonomi bersipat nyata, dinamis dan bertanggung jawab maka konsekuensinya adalah daerah yang harus dapat melaksanakan dan menjalankan roda pemerintahan dan urusan-urusan yang telah diserahkan pemerintah pusat dalam melaksanakan pemerintahan di daerah.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah sejak tanggal 1 januari tahun 2001, maka masing-masing daerah harus berupaya meningkatkan pendapatannya melalui sumber-sumber yang telah ada maupun berupaya menggali sumber-sumber lainnya untuk menjaga kesinambungan proses pembangunan di daerah dan tidak hanya bergantung kepada subsidi pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah ini di dukung dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

untuk mengatur penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada daerah. Hal itu daerah harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya dalam membiayai pembangunan. Selain itu, UU Nomor 32 tahun 2004 ini juga mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang berisi mengenai segala kebijakan keuangan yang berkaitan dengan otonomi yang sedang dan yang akan dilaksanakan oleh suatu daerah tertentu.

Pelaksanaan otonomi daerah diterapkan melalui undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Untuk mengatur penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah. Berarti, daerah harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya dalam membiayai pembangunan. Setiap daerah diharapkan berusaha dan berupaya untuk menggali sebanyak mungkin sumber keuangan daerah, agar proses pembangunan berjalan dengan baik, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Implementasinya, pemerintah daerah di berikan kewenangan untuk menggali potensi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah di amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah adalah :

- a. Hasil Pajak Daerah, adalah hasil pendapatan daerah yang bersumber dari pajak, pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

- b. Hasil Retribusi Daerah, adalah hasil pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Hasil Perusahaan dalam Daerah dan Kekayaan Daerah Lainnya, terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah, bagian laba dari penyertaan modal pada perusahaan milik Negara, bagian laba dari penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- d. Lain-lain Pendapatan yang sah, terdiri dari penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, bunga deposito, penerimaan atas tuntutan ganti rugi, dll.

Pajak Daerah adalah salah satu penerimaan daerah yang berperan penting sebagai penggerak pembangunan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk dipergunakan membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Adapun yang termasuk dalam Pajak Daerah adalah :

- a) Pajak Hotel, adalah pajak atas pelayanan yang diberikan oleh hotel baik berupa fasilitas penginapan dan peristirahatan, termasuk jasa terkait lainnya tetap dipungut bayaran, seperti fasilitas telepon, olahraga, hiburan, dll.
- b) Pajak Restoran, adalah pajak atas pelayanan yang diberikan oleh restoran, baik fasilitas makanan juga fasilitas minuman.
- c) Pajak Hiburan, adalah pungutan daerah atas pelayanan hiburan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan keramaian lainnya yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- d) Pajak Reklame, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yaitu benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang atau jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum.
- e) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah atau air permukaan bagi OP atau Badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.
- f) Pajak Penerangan Jalan, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya Pemerintah Daerah.
- g) Pajak Parkir, adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor.

- h) Pajak Sarang Burung Walet, adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan pengusahaan sarang burung walet.
- i) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- j) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Salah satu hasil pajak Daerah adalah Pajak Hotel yang merupakan sumber pendapatan potensial. Hal ini penting artinya untuk memberi pelayanan kepada wajib pajak dan masyarakat sebagai pengguna jasa hotel, mengingat semakin banyaknya didirikan hotel saat ini. Adapun pungutan yang dibebankan kepada rakyatnya, dengan bermacam-macam pungutan, namun yang berlaku umumnya di hampir semua Negara adalah Pajak dan Retribusi. Tidak terkecuali pula bagi daerah Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari 16 Kecamatan yang termasuk sebagai daerah otonom di Indonesia. Untuk membiayai pengeluaran daerah baik berupa pembiayaan rutin ataupun pembangunan yang memerlukan dana, maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu selaku unsur pelaksana Daerah di bidang Pendapatan daerah diharuskan mampu menggali potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan usaha lainnya secara optimal.

Tabel 1.1 : Daftar Hotel, Wisma, Penginapan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu Beserta Jumlah Kamar yang ada.

| No | Nama Fasilitas Akomodasi | Jumlah Kamar | Alamat |
|---------------|---------------------------------|---------------------|------------------|
| 1 | Penginapan Pasir Indah | 25 | Pasir Pengaraian |
| 2 | Penginapan Rokan Permai | 13 | Pasir Pengaraian |
| 3 | Penginapan Gelora Bhakti | 52 | Pasir Pengaraian |
| 4 | Penginapan Putri Bungsu | 20 | Pasir Pengaraian |
| 5 | Penginapan Bahagia | 16 | Pasir Pengaraian |
| 6 | Penginapan Kurnia | 20 | Pasir Pengaraian |
| 7 | Hotel Sapadia Rohul | 68 | Pasir Pengaraian |
| 8 | Wisma 99 | - | Rambah Hilir |
| 9 | Wisma Taruna Jogja | 11 | Tambusai |
| 10 | Netra Hotel | 25 | Ujung Batu |
| 11 | Penginapan sinar Baru | 13 | Ujung Batu |
| 12 | Penginapan Abadi | 52 | Ujung Batu |
| 13 | Penginapan Musdalifah | - | Ujung Batu |
| 14 | Penginapan Restu | 20 | Ujung Batu |
| 15 | Penginapan Putri Melayu | 16 | Ujung Batu |
| 16 | Wisma Ilham | 20 | Ujung Batu |
| 17 | Penginapan sahwa | - | Ujung Batu |
| Jumlah | | 371 | |

Sumber : Data dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab Rokan Hulu 2012

Kabupaten Rokan Hulu Menerbitkan Peraturan Daerah No. 22 tahun 2002 tentang Pajak Hotel bukan tanpa alasan, hal ini mengingat dalam upaya mendukung pelaksanaan otonomi daerah, sehingga perlu menggali sumber Pendapatan Asli Daerah termasuk didalamnya Pajak Hotel.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan asli Daerah dari Hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil

Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan daerah lainnya, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan cara, berpedoman dan tumpuhan pada peraturan yang benar, melangkah dengan pasti dan konsisten diatas peraturan penentu arah kebijakan yang tepat berada dalam sistem dan mekanisme yang mantap dalam melaksanakan tanggung jawab serta memperoleh dukungan positif dari semua pihak. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel : 1.2 : Daftar Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu Mulai dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2011.

| No | Tahun | Pajak Daerah | Retribusi Daerah | BUMD | Lain-Lain Pendapatan yang Sah | Jumlah |
|---------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1 | 2008 | 3.174.357.022,43 | 8.826.159.311,00 | 2.509.258.791,00 | 7.743.018.113,00 | 22.252.793.237,43 |
| 2 | 2009 | 3.398.187.615,00 | 4.027.041.380,00 | 2.990.821.583,00 | 15.830.050.346,00 | 26.246.100.924,00 |
| 3 | 2010 | 3.883.021.843,00 | 3.686.510.450,00 | 2.614.246.395,00 | 17.355.954.194,36 | 27.539.732.882,36 |
| 4 | 2011 | 5.558.056.911,00 | 3.462.187.650,00 | 2.693.134.715,00 | 23.451.279.462,00 | 35.164.658.738,00 |
| Jumlah | | 16.013.623.391,43 | 20.001.898.791,00 | 10.807.461.484,00 | 64.380.302.115,36 | 111.203.285.781,79 |

Data : Dinas pengelolaan keuangan dan Aset Kab Rokan Hulu 2011

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari empat sektor pendapatan yaitu sektor Pajak Daerah sebesar Rp.16.013.623.391,43, Retribusi Daerah sebesar Rp.20.001.898.791,00, BUMD sebesar Rp.10.807.461.468,00 lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah sebesar Rp.64.380.302.115,36. Dari empat sektor Pendapatan Asli Daerah diatas terlihat bahwa dari sektor pajak daerah diperoleh pendapatan sebesar Rp. 16.013.623.391,43 dari tahun 2008 sampai tahun 2011. Dan pihak Dinas pengelolaan Keuangan dan Aset Kab Rokan Hulu perlu meningkatkan pendapatan dari sektor Pajak Daerah karena dari jumlah hasil Pendapatan Asli Daerah empat tahun terakhir yang berjumlah Rp. 111.203.285.781,79 dan sektor Pajak Daerah hanya mampu menyumbang atau kontribusinya hanya Rp. 16.013.623.391,43 atau berkisar 14,20 %.

Dari empat sektor Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan mampu menjadi modal dasar untuk membiayai pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu. Untuk itu pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu melakukan berbagai upaya untuk menggali dalam rangka peningkatan pendapatan daerah tersebut. Salah satu sumber Pendapatan Daerah yang harus diperhatikan atau diupayakan dalam hal peningkatan pendapatan Asli daerah yaitu bersumber dari Pajak daerah, dimana sektor ini selalu bisa di upayakan dalam hal peningkatan Pendapatan Asli daerah bagi Kabupaten Rokan Hulu. Untuk lebih jelasnya tentang sumber Pendapatan Asli Daerah dari seKtor Pajak Daerah yang terealisasi pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3 : Daftar Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu Hulu dari sektor Pajak daerah mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011.

| Uraian | TAHUN | | | | Jumlah |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Pajak Hotel | 578.075.397 | 558.270.328 | 204.500.570 | 359.742.213 | 1.700.588.508 |
| Pajak Restoran | 600.080.273 | 822.133.378 | 933.948.391 | 1.249.416.245 | 3.605.578.287 |
| Pajak Hiburan | 45.930.000 | 52.777.600 | 43.355.000 | 2.250.000 | 144.312.600 |
| Pajak Reklame | 130.797.800 | 114.562.750 | 153.931.800 | 251.195.222 | 650.487.572 |
| Pajak Penerangan Jalan | 886.013.518 | 1.017.602.264 | 2.390.822.252 | 2.234.888.411 | 6.529.326.445 |
| Pajak Parkir | - | - | - | - | - |
| Pajak Sarang Burung Walet | - | - | - | - | - |
| Pajak Pengambilan Bahan Galian C | 933.460.033 | 832.841.295 | 862.822.587 | 685.417.143 | 314.541.058 |
| Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | - | - | - | 769.996.896 | 769.966.896 |
| Pajak Air Tanah | - | - | - | 5.150.781 | 5.150.781 |
| Jumlah | 3.174.357.021 | 3.398.187.615 | 4.589.380.600 | 5.558.056.911 | 13.719.952.147 |

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu 2011

Dari tabel di atas ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu dari sektor Pajak Daerah telah menyumbangkan sebesar

Rp. 13.719.952.147 Miliar dari tahun 2008 sampai 2011. Dari sektor ini Pajak Hotel terealisasi sebesar Rp. 1.700.588.508 miliar dari sektor Pajak Daerah di Kabupaten Rokan Hulu.

Pajak Daerah bagi Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang dimaksud sebagai sumber pemasukan daerah adalah *Pajak Hotel* yang semula bernama *Pajak Pembangunan I* dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 06 Tahun 1975, tetapi sejak dikeluarkannya UU No. 18 Tahun 1997 diganti nama menjadi Pajak Hotel dan Restoran, berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) No. 22 tahun 2002 terhadap setiap Wajib Pajak yang ada dengan ruang lingkupnya sama dengan Pajak Pembangunan I.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No.1 Tahun 2011 pasal 1 pada poin (10) tentang pajak hotel, Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Sedangkan yang dimaksud Hotel dalam Perda ini adalah Fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pengsanggrahan, rumah penginapan dan jenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar. Pengusaha Hotel yang dimaksud dalam perda ini adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Pada Bab III pasal 4 tentang pajak hotel, poin (1) Objek Pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk Fasilitas olahraga dan hiburan. Poin (2) jasa

penunjang sebagaimana yang dimaksudkan pasal ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, foto copy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang di sediakan atau dikelola Hotel. Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah :

- a. Jasa tempat tinggal yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan hotel yang dimampatkan oleh umum

Pajak Hotel adalah merupakan iuran atau pungutan wajib dibayar atas pemakaian atau pemampatan usaha pelayanan hotel sejenisnya yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang sipatnya memaksa sesuai ketentuan yang berlaku sebesar 10 %, dengan besar pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan jumlah pembayaran atau yang di bayar kepada hotel, terdapat pada pasal 5 , 6, 7 Bab III Peraturan Bupati No. 26. Tahun 2011 tentang dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan pajak.

Target penerimaan Pajak Hotel adalah ditetapkan terhadap setiap wajib pajak pengusaha hotel atau badan yang menyelenggarakan usaha untuk dan atas nama sendiri, atau untuk atas nama pihak lain yang mana pajak hotel sebagai salah satu sumber pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu, yang di galang yang berguna kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan daerah, lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel : 1.4 : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2008 sampai Tahun 2012 di Kabupaten Rokan Hulu.

| No | Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|----|-------|-------------|----------------|----------------|
| 1 | 2008 | 270.000.000 | 578.075.397 | 214 % |
| 2 | 2009 | 400.000.000 | 558.270.328 | 140 % |
| 3 | 2010 | 425.000.000 | 204.500.570 | 48,12 % |
| 4 | 2011 | 300.000.000 | 359.742.213 | 119,91 % |
| 5 | 2012 | 350.000.000 | 315.400.238 | 90,12 % |

Sumber : dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab Rokan Hulu 2013

Tabel diatas memperlihatkan realisasi penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Rokan Hulu secara keseluruhan yaitu tahun 2008 Realisasi sebesar 214 % dan kemudian mengalami kenaikan kembali melebihi target menjadi 140 5, kemudian pada tahun 2010 mengalami penurunan secara drastis menjadi 48,12 %, namun pada tahun 2011 realisasi kembali naik menjadi 119,19 % dan mampu melebihi target, kemudian kembali mengalami penurunan pada tahun 2012 realisasi penerimaan hanya mencapai 90,12 %.

Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan bahwa penerimaan daerah dari sektor pajak hotel selalu dapat ditingkatkan dan bahkan melampaui target. Namun pada tahun 2010 dan 2012 penerimaan turun hal ini di sebabkan pihak Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu diduga kurangnya pengawasan terhadap wajib pajak. Selain itu masih banyaknya bangunan belum terdata oleh pihak Dinas terkait pemungutan pajak, yang seharusnya telah dikenakan tarif pajak sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu No.26 tahun 2011 pada Bab I pasal 1 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak hotel.

Kabupaten Rokan Hulu memang menjadi potensi bagi pemungutan pajak hotel. Satu hal yang perlu dicermati bahwa tidak selalu tercapainya Pajak Hotel yang sudah ditargetkan diduga belum optimalnya mekanisme kerja pihak Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu selaku unsur pelaksana pemungutan Pajak Hotel, dan pengelola keuangan daerah, sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait pemungutan Pajak Hotel ini Belum bisa mencapai realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2008 dan 2009 yang masih memegang tingkat pendapatan dari sektor pajak hotel lima tahun terakhir. Kemudian penulis juga menemukan gejala-gejala dilapangan sebagai berikut :

1. belum terkumpulnya sumber-sumber penerimaan Pajak Hotel secara keseluruhan oleh petugas lapangan seperti jumlah kamar hotel,
2. Belum diberlakukannya pemungutan pajak terhadap usaha kos-kosan yang jumlah kamarnya lebih dari 10 dan belum di lakukannya pendataan rumah kos-kosan tersebut .
3. Ketentuan tarif pajak sebesar 10 % atas setiap wajib pajak yang terdapat dalam Peraturan bupati No.26 Tahun 2011 tentang tarif pajak hotel belum dapat di terapkan sepenuhnya karena selain proses pemungutan pajak tidak berjalan dengan baik juga kondisi perhotelan lebih banyak merupakan usaha rakyat yang di kelola secara kekeluargaan.
4. Lemahnya pengawasan terhadap penghasilan sebenarnya pendapatan dari wajib pajak, sehingga setiap pembayaran pajak hotel itu tidak ditanyakan dan diminta data orang yang menginap dalam setiap bulannya, dalam artian berapa yang di berikan wajib pajak itu lah yang di dapatkan hasil pajak untuk bulan itu.

Berdasarkan Latar belakang dan gejala yang ditemukan penulis dilapangan, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROKAN HULU”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang penulis temui di lapangan sehubungan sulitnya tercapai target penerimaan pajak daerah dan retribusi pada umumnya dan pajak hotel pada khususnya, maka dapatlah dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah : **“Bagaimana Penerimaan Pajak Ditinjau dari Sistem Prosedur Pemungutan Pajak Hotel Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah **“Untuk mengetahui Penerimaan Pajak Ditinjau dari Sistem Prosedur Pemungutan Pajak Hotel Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu”**.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya dalam bidang pajak daerah dalam hal ini pajak hotel.
2. Sebagai bahan informasi bagi Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset beserta jajarannya tentang pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Rokan Hulu.
3. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan studi perbandingan atau informasi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peneliti lain untuk melakukan kajian atau penelitian dalam aspek yang luas.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terbagi dalam VI (Enam) pokok bahasan atau 6 Bab, yang masing-masing bab terbagi lagi dalam sub-sub bagian yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang ; latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini membahas tentang teori-teori yang melandasi masalah-masalah yang akan diteliti, antara lain pengertian pajak, pengertian pemungutan, pengertian penerimaan, pengertian pajak hotel, dinas pendapatan daerah atau DPKA, definisi konsep, konsep operasional.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini berisi keadaan umum kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu, struktur organisasi dan uraian tugas, keadaan pegawai serta fasilitas kerja pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi distribusi frekuensi tanggapan responden tentang sistem pemungutan pajak dan kinerja pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaen Rokan Hulu dan hasil pengelolaan data di lapangan serta hasil penelitian di lapangan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang sifatnya dapat membangun bagi objek penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang dicantumkan di dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial.

Dari uraian di atas, tampak bahwa karena kepentingan rakyat, negara memerlukan dana untuk kepentingan tersebut. Dana yang akan dikeluarkan ini tentunya dapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak. Pemungutan pajak terlebih dahulu disetujui oleh rakyatnya sebagaimana dinyatakan dalam pasal 23 ayat 2 undang-undang dasar 1945 yang menegaskan agar setiap pajak yang akan dipungut haruslah berdasarkan undang-undang. Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945, ketentuan tersebut diatur dalam pasal 23A yang selengkapnya berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pemungutan pajak yang harus berlandaskan undang-undang ini berarti pemungutan pajak tersebut telah mendapat persetujuan dari rakyatnya melalui

perwakilannya di dewan perwakilan rakyat (DPR) yang biasa disebut berasaskan yuridis. Dengan asas ini berarti pemerintah telah memberikan jaminan hukum yang tegas akan hak negara dalam memungut pajak.

Menurut Soeparman (dalam Ilyas Dan Burton, 2008 : 6) pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dimana mencantumkan istilah wajib pajak dengan harapan terpenuhinya ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama dengan wajib pajak, sehingga perlu pula dihindari penggunaan istilah paksaan. Selanjutnya ia berpendapat terlalu berlebihan kalau khusus mengenai pajak ditekankan pentingnya unsur paksaan karena dengan mencantumkan unsur paksaan seakan-akan tidak ada kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya.

Menurut Andiani (dalam Afrizal 2009: 23) pajak adalah iuran kepada negara dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk Negara berkewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Soemitro (1997:3) dalam buku erly suandy, pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pajak daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak juga menurut Soemitro (1990: 50) mengatakan : Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum.

Secara umum pengertian pajak yang menurut Dr. S Soeparman (2011:3) adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari definisi ini tidak terlihat istilah dipaksakan karena bertitik tolak kepada iuran wajib. Sisi lainnya berhubungan dengan kontraprestasi menekankan pada mewujudkan kontraprestasi itu diperlukan pajak.

Selanjutnya pengertian Pajak menurut Prof. Dr.MJH. Smeets (dalam Waluyo, 2011: 2) berpendapat bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat di paksakannya, tanpa ada kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, yang dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Kemudian pengertian pajak yang dirumuskan oleh Siahaan, M.P (2005:7) adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-

undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/ balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dari beberapa definisi pajak diatas dapat saya simpulkan Pajak adalah iuran yang diberikan dari rakyat kepada pemerintah dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mana pembayaran pajak bertujuan untuk pembangunan daerah.

Berdasarkan definisi pajak diatas dapat disimpulkan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

- a. Pajak dipungut oleh Negara, berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sipatnya dapat di paksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment.
- e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
- f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- g. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgetair*, yaitu mengatur artinya pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar masyarakat khususnya wajib pajak terkait atas jasa yang diberikan pemerintah yang sifatnya dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung dari akibat pembayaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna untuk membiayai pembangunan dalam hal kesejahteraan umum. Sehingga pajak tersebut berbeda dengan retribusi yaitu dalam hal memaksanya serta aspek biasa yang dapat dinikmati oleh retribusi.

Menurut Soemitro (dalam Siti Rahayu dan Ely Suhayati, 2010 : 3) pajak mempunyai fungsi sebagai berikut;

1. Fungsi penerimaan (budgeter), yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi mengatur (regular), yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

2.2 Pengertian Hotel

Hotel adalah bangunan khusus yang disediakan bagi seseorang atau kelompok untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

“Untuk memperjelas wawasan mengenai usaha perhotelan, berikut ini akan diuraikan beberapa pengertian tentang hotel. Surat keputusan menteri pariwisata, ps dan telekomunikasi nomor KM 37/PW- 340/MPPT- 86 memberikan batasan bahwa hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan layanan penginapan, makanan, dan minuman serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial. Selanjutnya dalam peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 67 tahun 1996 tentang penyelenggaraan kepariwisataan republik Indonesia pada pasal 61 dinyatakan bahwa “pelayanan pokok usaha hotel yang harus disediakan sekurang-kurangnya harus meliputi penyediaan kamar tempat menginap, penyediaan tempat da pelayanan makan dan minum, penyediaan pelayanan pencucian pakaian dan penyediaan fasilitas lainnya. Peraturan pemerintah tersebut secara inflisit memberikan definisi mengenai kata hotel.”

Dennis L. poster dalam (Agus sambodo dan Bagiono, Marzan 2008:28) mengungkapkan bahwa dalam arti luas, hotel mungkin merujuk pada segala jenis penginapan. Sedangkan dalam arti sempit. Hotel adalah sebuah bangunan yang dibangun khusus untuk menyediakan penginapan bagi para pejalan, dengan pelayanan makanan dan minuman.

Berdasarkan SK. Menhub. RI. No.PM 10/ PW.391/Phb-77 (dalam Bambang, 2008 : 27) hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan berikut makan dan minum.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu No. 26 Tahun 2011 tentang pajak hotel, hotel adalah Fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dipungut bayaran yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hotel termasuk jenis akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi seseorang atau sekelompok orang, menyediakan pelayanan penginapan, makanan, minuman serta layanan lain sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan teknologi.

2.3 Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel, termasuk juga rumah penginapan dan rumah kos yang memungut bayaran pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/ kota yang ada di Indonesia.

a. Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan sebagai berikut:

1. Objek Pajak Hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang, antara lain telepon, facsimile, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel
3. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan cara atau pertemuan di hotel.
4. Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana yang dimaksud diatas adalah :

- a. Tempat Jasa tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
- b. Jasa sewa apartemen, kondonium dan jenisnya.
- c. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
- d. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dimanfaatkan oleh umum.

b. Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Hotel

Pada pajak hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan melakukan usaha dibidang jasa penginapan.

c. Tarif Pajak Hotel

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bila tidak terdapat jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

2.4 Pengertian Penerimaan

Yang dimaksud disini adalah penerimaan pendapatan dari kegiatan pemungutan pajak hotel oleh kolektor yang berwenang terhadap setiap wajib pajak hotel yang sudah terdata di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu secara rutin, sesuai dengan besarnya ketetapan dan peraturan yang berlaku.

a. Azas Penerimaan dari Pemungutan Pajak Hotel

Azas principle adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar atau tumpuan untuk menjelaskan sesuatu permasalahan. Lazimnya suatu pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan azas-azas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil/tidaknya suatu penerimaan pajak.

Adam Smith (dalam Waluyo, 2011 : 13) mengemukakan 4 azas pemungutan pajak yang lazim dikenal dengan *four canons taxation* atau sering disebut the four maxims dengan uraian sebagai berikut :

1. Equality (azas persamaan)

Pemungutan pajak, harus bersifat adil dan merata yaitu pajak yang dikenakan pada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2. Certainty (azas kepastian)

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang, artinya wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran,

3. Convenience of payment (azas menyenangkan)

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat yang tidak menyulitkan wajib pajak

4. Economy

Biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin demikian pula beban yang dipikul oleh wajib pajak.

Dari prinsip yang dikemukakan Adam Smith diatas prinsip equality merupakan salah satu dari prinsip utama dalam rangka pemungutan pajak, yang menjelaskan bahwa setiap warga Negara berpartisipasi dalam pembiayaan fungsi pemerintah suatu Negara, secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dapat dikatakan pula bahwa keadilan pemungutan pajak dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Keadilan horizontal

Pemungutan pajak adil secara horizontal apabila beban pajaknya sama atas semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, member perlakuan yang berbeda terhadap orang atau badan yang berada dalam keadaan ekonomi yang berbeda tingkatannya, penghasilan yang diperoleh masing masing individu berbeda, maka akan dikenakan jumlah pajak yang berbeda berdasarkan kepada tingkat penghasilan seseorang.

2. Keadilan vertikal

Semakin kecil penghasilan seseorang maka jumlah pajak tentu lebih kecil bahkan tidak dikenakan pajak karena ada batas minimum pengenaan pajak.

Menurut Andriani (dalam Rosdiana Dan Tarigan, 2005 : 107), membagi teknik pemungutan pajak menjadi tiga, yaitu:

- a. Wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang,
- b. Ada kerja sama antara wajib pajak dengan fiskus
- c. Fiskus menentukan jumlah pajak yang terutang.

Selanjutnya undang-undang pajak nasional memiliki prinsip-prinsip dalam sistem pemungutan pajak seperti yang tertuang dalam penjelasan dari undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Bahwa pemungutan pajak berdasarkan undang-undang pajak nasional merupakan perwujudan dan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan yang sangat diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan.
2. Tanggung jawab pelaksanaan pajak berada pada anggota wajib pajak sendiri. Pemerintah hanya memberikan pembinaan, penelitian dan pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut.
3. Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang berutang, sehingga dengan cara ini kejujuran dari wajib pajak sangat diperlukan dalam rangka pemungutan pajak.

Berdasarkan ketiga prinsip diatas, maka wajib pajak diwajibkan menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sementara pemerintah hanya sebagai Pembina, peneliti dan pelaksana terhadap kewajiban pajak tersebut.

Dengan sistem ini diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis dapat dihilangkan. Selain itu jaminan dan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak lebih diperhatikan, dengan demikian dapat merangsang peningkatan kesadaran tanggung jawab perpajakan dimasyarakat.

Beberapa teori tentang pembenaran pemungutan pajak yang dipungut oleh pemerintah antara lain:

a. Teori Asuransi

Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, Negara disamakan dengan perusahaan asuransi, untuk mendapat perlindungan warga Negara membayar pajak sebagai premi.

b. Teori Kepentingan

Menurut teori ini pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan Negara. Makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, makin besar juga pajaknya

c. Teori Daya Pikul

Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari wajib pajak jadi tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya pikul wajib pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja wajib pajak tersebut.

d. Teori Kewajiban Mutlak

Teori ini didasarkan paham organisasi negara yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan di bidang pajak. Dengan sifat seperti itu maka negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya. Menurut teori ini dasar hukum pajak terletak apada hubungan antara rakyat dengan negara, dimana negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak.

e. Teori Daya Beli

Teori ini adalah teori modern, teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya negara memungut pajak melainkan banyak melihat kepada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

Menurut Andriani (dalam Rosdiana Dan Tarigan, 2005 : 107), membagi teknik pemungutan pajak menjadi tiga, yaitu:

- a. Wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang,
- b. Ada kerja sama antara wajib pajak dengan fiskus
- c. Fiskus menentukan jumlah pajak yang terutang.

Menurut Mardiasmo (2003:8) hambatan dalam pemungutan pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat atau wajib pajak enggan (pasif) untuk membayar pajak disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat,
- b. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat,
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a. *Tax avoidance* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang
- b. *Tax evasion* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

b. Sistem Dan Prosedur Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hulu

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa sistem perpajakan Indonesia adalah sistem self assessment, yang telah diberlakukan sejak reformasi perpajakan di Indonesia tahun 1983. Penetapan sistem self assessment juga ada dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1987 dan yang terbaru Undang-Undang 34 Tahun 2000. Karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama dan tidak biasa diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah. Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Official Assessment

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah.
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.

2. Sistem Self Assesment

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada pihak wajib pajak

untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Sistem Withholding

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Sistem yang sering digunakan dalam pemungutan pajak daerah adalah Sistem Self Assessment dan Official Assessment. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang No. 18 tahun 1997 pasal 7 tentang pajak daerah, bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Untuk pemungutan pajak hotel dipakai Sistem Self Assessment yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah kabupaten/ kota, yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menjadi fokus, hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

Cara pemungutan pajak dibedakan menjadi tiga (3) stelsel, yaitu:

1. Stelsel nyata (riil stelsel)

Pengenaan pajak berdasarkan pada objek yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah diketahui.

2. Stelsel anggapan (fictive stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun, sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya.

3. Stelsel campuran

Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya, sebaliknya apabila lebih kecil maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

Dengan demikian Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dalam hal penerimaan daerah lebih memperhatikan azas dan tata cara pemungutan pajak, baik itu pajak hotel maupun pajak-pajak yang lainnya yang merupakan pendapatan asli daerah. Sehingga pelaksanaan pemungutan dapat berjalan seefektif dan seefisien mungkin.

2.5 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah suatu instansi pemerintah sekaligus unsur pelaksana daerah dibidang pendapatan dan penerimaan daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk kegiatan pemungutan pajak hotel yang dipimpin langsung oleh kepala dinas dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan pembantuan dibidang Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Adapun dasar hukum pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang peraturan daerah, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pengelolaan pajak daerah, yang meliputi fungsi pemungutan, koordinasi dan pembinaan teknis pemungutan pajak dan retribusi daerah, bahwa rangkaian upaya pengelolaan organisasi ini akan menjadi kunci keberhasilan pencapaian tujuan yang diharapkan.

Menurut Siagian (1995:243) mekanisme kerja dalam suatu organisasi tidak terlepas dari kegiatan planning, organizing, accounting dan controlling untuk tuntutan pelaksanaan mekanisme kerja yang baik.

Penagihan ataupun pemungutan pajak hotel merupakan kegiatan penarikan iuran atau pemungutan pajak oleh petugas kolektor yang telah ditunjuk terhadap setiap wajib pajak yang teridentifikasi di Kabupaten Rokan Hulu, dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku termasuk bagi wajib pajak yang melakukan tunggakan, karena bagaimanapun pemungutan pajak menjadi kewajiban yang dapat dipaksakan atas jasa pekerjaan/ penyeleggaraan hotel.

Jadi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak hotel di Kabupaten Rokan Hulu khususnya melalui kegiatan pemungutan yang dilakukan, maka mekanisme kerja tersebut harus direalisasi secara menyeluruh dan optimal terhadap setiap satuan unit kerja yang ada disamping juga diperlukan kesadaran wajib pajaknya, karena tugas pemungutan pajak hotel tidak akan pernah mencapai target penerimaan tanpa adanya hubungan kerja sama yang baik di antara sesama petugas dan masyarakat.

2.6 Defenisi Konsep

Secara umum pengertian pajak yang dirumuskan oleh Siahaan, M.P (2005:7) adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/ balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Hotel adalah bangunan khusus yang disediakan bagi seseorang atau kelompok untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel, termasuk juga rumah penginapan dan rumah kos yang memungut bayaran pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/ kota yang ada di Indonesia.

Pada pajak hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang

menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan melakukan usaha dibidang jasa penginapan.

Yang dimaksud Pemungutan Pajak disini adalah kegiatan pemungutan pajak hotel oleh kolektor yang berwenang terhadap setiap wajib pajak hotel yang sudah terdata di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu secara rutin, sesuai dengan besarnya ketetapan dan peraturan yang berlaku.

Adam Smith (dalam Waluyo, 2011 : 13) mengemukakan 4 azas pemungutan pajak yang lazim dikenal dengan *four canons taxation* atau sering disebut the four maxims dengan uraian sebagai berikut :

1. Equality (azas persamaan)

Pemungutan pajak, harus bersifat adil dan merata yaitu pajak yang dikenakan pada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2. Certainty (azas kepastian)

Penepatan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang, artinya wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran,

3. Convenience of payment (azas menyenangkan)

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

4. Economy

Biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin demikian pula beban yang dipikul oleh wajib pajak.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah suatu instansi pemerintah sekaligus unsur pelaksana daerah dibidang pendapatan dan penerimaan daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk kegiatan pemungutan pajak hotel yang dipimpin langsung oleh kepala dinas dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan pembantuan dibidang Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Adapun dasar hukum pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang peraturan daerah, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pengelolaan pajak daerah, yang meliputi fungsi pemungutan, koordinasi dan pembinaan teknis pemungutan pajak dan retribusi daerah, bahwa rangkaian upaya pengelolaan organisasi ini akan menjadi kunci keberhasilan pencapaian tujuan yang diharapkan.

2.7 Konsep Operasional

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Hal ini karena tujuan utama dari penelitian itu sendiri adalah untuk

memperoleh data. Dengan demikian, maka tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap konsep teori yang digunakan dalam penelitian ,serta mempermudah pemahaman dalam penggunaan konsep-konsep pada penelitian ini maka dibuatlah konsep operasional yang mengacu pada konsep teoritis,yang di nyatakan dalam pengukuran penelitian. Adapun konsep operasionalnya berdasarkan urutan prosedur pemungutan pajak hotel berdasarkan peraturan bupati No 26 Tahun 2011 tentang pajak hotel adalah:

1. Pendaftaran dan pendataan

Pendaftaran dan pendataan dimaksudkan dengan suatu upaya pengumpulan dan penyusunan data mengenai seluruh potensi objek dan objek pajak hotel yang ada di kabupaten Rokan Hulu oleh pihak dinas pengelolaan Keuangan dan Aset secara objektif dan lengkap untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam kartu data sehingga mempermudah proses penetapan target penerimaannya.

Adapun teknik pengukuran dalam penelitian ini adalah:

Setuju : Apabila Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset telah mengikuti prosedur pendaftaran dan pendataan dengan baik

Kurang Setuju : Apabila Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset telah mengikuti tetapi masih ada yang tidak mengikuti pendaftaran dan pendataan

Tidak Setuju : Apabila Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset telah masih ada yang tidak melakukan pendaftaran dan pendataan

2. Penetapan dan pemungutan

Penetapan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pihak dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk menetapkan target penerimaan pajak hotel di kabupaten Rokan Hulu secara bijaksana berdasarkan data yang diperoleh dan hasil pendapatan kemudian diadakan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang disampaikan kepada setiap wajib pajak hotel dan wajib mengisi SPTPD.

Pemungutan yaitu kegiatan pemungutan pajak hotel oleh petugas kolektor yang berwenang terhadap setiap wajib pajak yang sudah terdata, sesuai dengan besarnya ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Adapun tehnik pengukuran dalam penelitian ini adalah

Setuju : Apabila wajib pajak telah mengikuti prosedur menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang dengan baik

Kurang Setuju : Apabila wajib pajak hotel telah mengikuti tetapi masih ada wajib pajak yang tidak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang secara baik

Tidak Setuju : Apabila wajib pajak masih ada yang tidak melakukan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak

3. Penagihan

SKPDKB, SKPDKBT, SPTD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal di terbitkan.

Adapun tehnik pengukuran penelitiannya adalah

- Setuju : Apabila wajib pajak membayar pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan
- Kurang Setuju : Apabila wajib pajak telah membayar tapi masih ada yang belum membayar pajak sesuai jangka waktu yang ditentukan
- Tidak Setuju : Apabila wajib pajak masih ada yang belum membayar pajak

4. Pembukuan dan Pemeriksaan

Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

Pemeriksaan maksudnya adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tehnik penelitian pada pembukuan dan pemeriksaan adalah

Setuju : Apabila proses pembukuan dan pemeriksaan telah dilakukan dengan teratur dan dimasukkan kedalam buku

Kurang Setuju : Apabila proses pembukuan dan pemeriksaan telah dilakukan dengan sesungguhnya tapi belum teratur dan tidak dimasukkan kedalam buku

Tidak Setuju : Apabila pembukuan dan pemeriksaan ada yang tidak dilakukan

5. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pajak hotel kepada instansi yang kewenangannya sebagai pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah. Dalam melaksanakan nya dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain yang terkait.

Adapun tehnik penelitian pada pengawasan dan pengendalian ini adalah

Setuju : Apabila proses pengawasan dan pengendalian telah dilakukan dengan teratur oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kurang Setuju : Apabila proses pengawasan dan pengendalian telah dilakukan dengan sesungguhnya tapi belum teratur oleh dinas pengelolaan keuangan dan aset

Tidak Setuju : Apabila proses pengawasan dan pengendalian tidak dilakukan oleh dinas pengelolaan keuangan dan aset

2.8 Penelitian Terdahulu

Dari penelitian terdahulu yang diambil dari skripsi Rosi Andela (2013), yang berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi” dapat di ambil kesimpulan:

1. Tidak tercapainya realisasi dari target yang sudah ditentukan disebabkan karena:
 - a. Pelaksanakan pemungutan pajak hotel yang tidak baik maka target yang ditetapkan tidak akan terealisasi dengan baik karena sistem dan prosedur yang ditetapkan tidak dilaksanakan dengan maksimal.
 - b. Sistem kerja yang belum optimal dalam pemungutan pajak hotel oleh Dinas Pendapatan Daerah tidak terlepas dari faktor-faktor seperti masih banyak wajib pajak yang menunggak membayar pajak hotel, serta masih banyak rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak tentang arti pentingnya membayar pajak.
 - c. Tarif pajak hotel yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebesar 10% dari NJOP dirasa masih terlalu memberatkan karena kabupaten Bengkalis sering mati lampu karena itu pihak hotel kadang tidak bisa menutupi biaya operasional yang sangat besar setiap bulannya.
2. Sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel di kabupaten Kuantan Singingi
 - a. Sistem pemungutan pajak hotel kabupaten Kuantan Singgigi menggunakan sistem *self assesment* yaitu dibayar sendiri oleh wajib pajak dan sistem pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan

kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

- b. Di dalam pembukuan yang dilakukan, penetapan target pajak hotel maupun wisma dalam pembukuannya masih ada yang belum terealisasi
- c. Masih ada pemungut pajak yang dilakukan tidak oleh pemungut pajak itu sendiri atau kolektor yang berwenang memungutnya.

Sedangkan dari Jurnal Betty Rahayu (2011) Dalam Penelitian mengkaji tentang analisis potensi pajak hotel terhadap realisasi penerimaan pajak hotel di kabupaten gunung kidul, Pengukuran perbandingan tercermin dalam efektifitas Pajak Hotel yang nilainya selalu menurun dari tahun ke tahun selama tahun 2005 – 2009 bahkan nilai yang ada tidak lebih dari 5% setiap tahunnya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa potensi pajak hotel yang ada belum tergali secara optimal dan terdapat beberapa hal yang perlu menjadi koreksi terkait pajak hotel yang ada di Kabupaten Gunung kidul seperti sistem pengelolaan dan manajemen dari hotel hotel yang ada tersebut. Kata Kunci : Pajak Hotel, Potensi Pajak Hotel, Penerimaan Pajak Hotel, Efektifitas Pajak Hotel, Kabupaten Gunungkidul.

2.9 Hipotesis

“Diduga penyebab terjadinya kenaikan dan penurunan penerimaan pajak hotel pada dinas pengelolaan keuangan dan aset, dikarenakan kurang berjalannya sistem prosedur pemungutan pajak hotel di Kabupaten Rokan Hulu”

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di wilayah Kabuapten Rokan Hulu khususnya pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan hulu. Waktu penelitian ini dilakukan pada September 2012 sampai selesai.

1.2 Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap maka jenis data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui penelitian lapangan mengenai pelaksanaan pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di kantor Dinas pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu, kemudian data diolah agar memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian meliputi data tentang tanggapan responden terhadap pelaksanaan pemungutan pajak hotel

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari keterangan sumber-sumber lainnya yang dapat menunjang objek yang di teliti seperti buku buku, laporan, peraturan perundang-undangan yang mendukung melengkapi analisa data penelitian ini.

1.3 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari 84 orang PNS dan 32 orang Pegawai Honorer serta objek dari pajak hotel itu sendiri.

b. Sampel

Pengambilan sampel dari jumlah populasi yang dijadikan responden dari penelitian ini didasarkan pada teknik sampling purposive, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pada cara ini, siapa yang akan diambil sebagai anggota sampel diserahkan kepada pertimbangan pengumpul data yang berdasarkan atas pertimbangannya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian yaitu yang berkaitan dengan pajak hotel. Selain itu sebagian wajib pajak hotel juga di jadikan sebagai responden karena secara langsung keterangan dari wajib pajak akan membantu dalam pengambilan kesimpulan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah :

1. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu
2. Kepala Bidang PAD
3. Kasi Bidang PAD
4. Pegawai Staf Bidang PAD

Tabel 3. 1 : Keadaan Sub Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Pemungutan dan penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Rokan Hulu

| No | Sub Populasi | Sampel | Persentase | Keterangan |
|--------|-------------------|--------|------------|--------------------|
| 1 | Kepala DPKA | 1 | 100% | Sensus |
| 2 | Kabid PAD | 1 | 100% | Purposive Sampling |
| | Kasi PAD | 2 | 100% | Purposive Sampling |
| 3 | Pegawai Staff PAD | 13 | 100% | Purposive Sampling |
| Jumlah | | 17 | 100,00 | |

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu 2012

1.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara atau Interview

Interview terhadap responden atau tanya jawab secara langsung terhadap responden baik wawancara terpimpin maupun wawancara bebas kepada kepala dinas maupun staff yang berhubungan dengan objek penelitian yang telah dijadikan sampel.

b. Pertanyaan atau quesioner

Memberikan daftar pernyataan kepada responden dengan cara memilih alternative jawaban yang sudah disediakan oleh penulis sesuai dengan permasalahan yang akan teliti.

1.5 Analisis Data

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pajak hotel di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu, penulis menggunakan

metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul di analisis dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori sesuai dengan permasalahan yang ada. Menurut Suharsimi Arikunto (2003: 79) dalam menganalisis penulis akan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan presentase dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Dimana:

P = Presentase

F = Frekuensi

N = Total Jumlah

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Deskripsi Umum Ruang Lingkup Penelitian

Undang-Undang No 53 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten di Provinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 dan diresmikan oleh Gubernur Riau. Pada tanggal 5 Desember 1999 terbentuklah Kabupaten Rokan Hulu. Pada awalnya Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 Kecamatan, kemudian setelah beberapa tahun kemudian terus berkembang menjadi 16 kecamatan hingga sampai tahun 2013 ini.

Setelah terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu maka terbentuklah Dinas Pendapatan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Organisasi dinas daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Organisasi perangkat daerah tersebut berubah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah dengan adanya Peraturan Pemerintah ini maka Dinas Pendapatan berubah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Rokan Hulu.

4.2 Struktur Dinas Pengelolaan Keuangan dan aset

Adapun struktur yang ada pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu adalah :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam penyelenggaraan tugas dibidang pengelolaan keuangan, perlengkapan dan asset. Selain itu kepala dinas juga mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memimpin kegiatan dinas, baik administrasi maupun operasional, sesuai dengan pokok dan fungsi dinas.
2. Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan bagian, sub dinas, UPTD dan kelompok jabatan fungsional.
3. Memimpin, mengatur, membina, mengkoordinasi, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan DPKA dalam bidang ketatausahaan dinas, perencanaan program, pajak, retribusi serta pengendalian PBB dan BPHTB dan pendapatan lainnya.
4. Menetapkan rencana strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi DPKA.
5. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kerja DPKA sesuai dengan kebijaksanaan bupati.
6. Melaksanakan hubungan kerja sama dengan instansi terkait lainnya.
7. Membina dan memberikan motivasi serta bimbingan kepada bawahan dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja.
8. Memberi informasi, saran dan pertimbangan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas DPKA kepada bupati.

9. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugas-tugasnya kepada bupati melalui sekretaris daerah.
10. Melaksanakan tugas lainnya diberikan bupati sesuai bidang tugasnya.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melakukan menyusun program kerja dan rencana kegiatan, melaksanakan administrasi umum, ,mengolah administrasi keuangan, mengolah administrasi kepegawaian dan melaksanakan administrasi perlengkapan dan perawatan, serta menata usaha kegiatan lainnya. Sekretariat terdiri dari :

1. Subbag Administrasi dan Kepegawaian
2. Subbag Keuangan dan Perlengkapan
3. Subbag Perencanaan evaluasi dan Pelaporan

c. Bidang Pendapatan Asli Daerah

Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan evaluasi dan koordinasi di bidang pendapatan asli daerah. Bidang Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1. Seksi Pendataan dan Pembukuan
2. Seksi Penetapan dan Penagihan
3. Seksi Pengkajian Produk Hukum

Tugas Pokok dan Fungsi bidang Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam pasal 8 tentang tupoksi PAD yaitu :

- (1) Bidang Pendapatan Asli Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala

Dinas berupa penyiapan perumusan evaluasi dan koordinasi di bidang Pendapatan Asli Daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pada Bidang Pendapatan Asli Daerah;
- b. Mengkoordinasikan bahan perumusan dan pelayanan Pendataan dan Pembukuan;
- c. Mengkoordinasikan bahan perumusan dan koordinasi Penetapan dan Penagihan;
- d. Mengkoordinasikan sarana administrasi penunjang kegiatan pelayanan Perpajakan Daerah pada Bidang Pendapatan Asli Daerah;
- e. Mengkoordinasikan bahan perumusan dalam proses penyusunan, pengkajian terhadap rancangan Peraturan Daerah pada Bidang Pendapatan Asli Daerah;
- f. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis prosedur tata kerja Pelayanan Penagihan;
- g. Merumuskan dan menggali potensi baru dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah di Bidang Pendapatan Asli Daerah;

- h. Mengkoordinir penyusunan pembuatan daftar realisasi penerimaan atas dasar laporan-laporan berkala yang diterima bank tempat pembayaran pajak/retribusi daerah dan semua Pendapatan Asli Daerah;
 - i. Memberikan pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Dinas dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - j. Mengkoordinasikan tindakan dalam rangka upaya penegakan aturan hukum pada Bidang Pendapatan Asli Daerah;
 - k. Menyusun program kerja dalam rangka pengamanan rencana penerimaan;
 - l. Mengkoordinir penyusunan/ pembuatan pembukuan dan pelaporan atas penerimaan dan pemungutan;
 - m. Melakukan pengawasan dan pengendalian kinerja terhadap tugas, fungsi dan kewenangan pada Bidang Pendapatan Asli Daerah.
- d. Bidang Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan

Bidang dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan evaluasi dan koordinasi dibidang dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah.

Bidang Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan terdiri dari :

1. Seksi SDA
2. Seksi lain-lain Pendapatan Daerah
3. Seksi PBB dan BPHTB

e. Bidang Anggaran

Bidang anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan evaluasi dan koordinasi di bidang anggaran. Bidang Anggaran terdiri :

1. Seksi Perencanaan Anggaran
2. Seksi Pengendalian Anggaran

f. Bidang Pembendaharaan

Bidang Pembendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan belanja langsung dan tidak langsung pegawai dan petunjuk teknis administrasi keuangan, menyelesaikan permasalahan dan pembinaan pembendaharaan, menguji kebenaran penagihan melalui penelitian syarat-syarat kelengkapan Administrasi. Bidang Pembendaharaan terdiri dari :

1. Seksi Belanja
2. Seksi Verifikasi
3. Seksi Kas dan Pendanaan

g. Seksi Laporan Keuangan

Bidang Laporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan evaluasi dan koordinasi di bidang akuntansi. Bidang laporan keuangan terdiri dari :

1. Seksi Pembukuan dan Akuntansi
2. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan

h. Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dalam rangka pengadaan barang, penghapusan, pelelangan/pembelian sumbangan/hibah kepada pihak lain pemusnahan barang daerah dan menyiapkan pembukuan secara sistematis dan kronologis, menyiapkan bahan penyusunan laporan APBD, nota perhitungan dan laporan aliran arus kas, pembukuan aset serta verifikasi yang meliputi penelitian terhadap anggaran aparatur dan pelayanan public.

Bidang aset terdiri dari :

1. Seksi Inventarisasi
2. Seksi Penilaian dan Penghapusan
3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan

4.3 Kondisi Kepegawaian

Kondisi kepegawaian Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 berjumlah 116 (seratus enam belas orang) orang terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri sipil 84 (delapan puluh empat) orang; dan
- b. Pegawai Honor 32 (tiga puluh dua) orang

1.4 Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu

A. VISI

Visi adalah gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dalam jangka panjang. Sejalan dengan Visi Kabupaten Rokan

Hulu dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjawab berbagai tuntutan yang berkembang baik dilingkungan pemerintah maupun dilingkungan masyarakat dan didasari analisis lingkungan internal dan eksternal maka ditetapkan Visi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu yaitu : “ **MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DENGAN MANAJEMEN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TERBAIK, AKUNTABEL, TRANSPARAN, SERTA EFEKTIF DAN EFISIEN**”

B. MISI

Dalam rangka pencapaian Visi maka ditetapkan misi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu dalam pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan PAD dan bagi hasil pajak/bukan pajak secara berkisinambungan dengan menggali seluruh potensi daerah
2. Memenage keuangan secara profesional, akuntabel, dan transparan yang berorientasi pada prinsip efisien dan efektif
3. Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah berdaya guna dan berhasil guna

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai rekapitulasi tentang pelaksanaan sistem penerimaan pajak hotel pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu dan hambatan dalam sistem penerimaan pajak hotel di Kabupaten Rokan Hulu secara keseluruhan serta upaya yang dilakukan oleh DPKA untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel. Dengan adanya rekapitulasi ini maka akan diperoleh hasil yang akurat terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Rokan Hulu.

5.1 Identitas Responden

Dalam melihat kemampuan pegawai pada Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu, maka penulis menguraikan secara singkat tentang identitas responden yang terdiri dari jenis kelamin pegawai, tingkat usia/umur dan tingkat pendidikan pegawai. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana background responden yang dijadikan objek penelitian sehingga penulis dapat lebih mengenalinya.

5.1.1 Jenis Kelamin

Jenis kelamin mempunyai pengaruh terhadap sikap pegawai dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari, dimana seorang pria biasanya bekerja lebih cepat dari wanita. Walaupun demikian wanita juga biasanya memiliki sikap yang lebih teliti dan rapi dalam melaksanakan pekerjaan dibandingkan pria.

Untuk lebih jelas keadaan pegawai yang menjadi sampel yang ada pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1 Klasifikasi Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Frekuensi | Persentase |
|----|---------------|-----------|------------|
| 1 | Pria | 13 | 76,47 % |
| 2 | Wanita | 4 | 23,52% |
| | Jumlah | 17 | 100,00% |

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diamati bahwa perbandingan antara jumlah pegawai pria dengan perempuan sangat jauh berbeda. Dimana pria sangat mendominasi yaitu sebanyak 13 orang atau sekitar 76,47%, sedangkan perempuan berjumlah 4 orang atau sekitar 23,52% dari keseluruhan jumlah pegawai.

5.1.2 Tingkat Usia/Umur

Semakin bertambah usia seseorang maka jiwa kedewasaan akan terpatrit dalam sikap dan tingkah laku yang selanjutnya akan mempengaruhi etos kerjanya. Kelompok kerja pegawai di bagian Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kabupaten Rokan hulu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2 Klasifikasi Jumlah Responden Menurut Tingkat Usia/Umur

| No | Kelompok Umur | Frekuensi | Persentase |
|----|------------------|-----------|------------|
| 1 | 25-35 tahun | 9 | 52,94 % |
| 2 | 36-45 tahun | 5 | 29,41 % |
| 3 | 46 tahun-ke atas | 3 | 17,64 % |
| | Jumlah | 17 | 100,00 % |

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan aset 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa responden yang berada pada usia 25-35 tahun memiliki jumlah cukup besar yaitu sebanyak 9 orang atau sebesar 52,94 %, untuk pegawai yang memiliki usia 36-45 tahun sebanyak 5 orang atau sekitar 29.41%, sedangkan pegawai yang berusia 46 tahun ke atas berjumlah 3 orang atau sekitar 17,64%, dari keseluruhan jumlah pegawai.

5.1.3 Tingkat Pendidikan

Sebagai bahan pertimbangan bagi penulis untuk memahami segala sesuatu yang menyangkut dengan keterangan, tanggapan, dan jawaban-jawaban yang diberikan responden pada masalah variabel penelitian. Maka penulis terlebih dahulu melihat segi latar belakang tingkat pendidikan responden.

Dari 17 orang pegawai yang menjadi responden dalam penelitian ini, secara umum dapat dikategorikan menurut 3 jenjang pendidikan, yaitu:

Tabel 5.3 Klasifikasi Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Frekuensi | Persentase |
|----|--------------------|-----------|------------|
| 1 | S1 | 10 | 58,82 |
| 2 | S2 | 1 | 5.88 |
| 3 | SMA Sederajat | 6 | 35,29% |
| | Jumlah | 17 | 100,00% |

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan aset 2012

Dari tabel diatas dapat di lihat klasifikasi pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu yang menjadi responden berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai yang berpendidikan S1 sebanyak 10 orang atau sekitar 58,82%. Dan pegawai yang berpendidikan S2 berjumlah 1 orang atau

sekitar 5.88%. Sedangkan jumlah pegawai pendidikan SMA Sederajat berjumlah 6 orang atau sekitar 35,29%.

5.2 Prosedur Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hulu

5.2.1 Pendaftaran Dan Pendataan

Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, serta mengembalikan kepada petugas pajak. Selanjutnya, petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak.

Tabel 5.4 Tanggapan Responden Terhadap Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Dalam Melakukan Pendaftaran Dan Pendataan Dengan Baik.

| No | Jawaban responden | Frekuensi | Persentase % |
|----|-------------------|-----------|--------------|
| 1 | Setuju | 13 | 76,47% |
| 2 | Kurang setuju | 2 | 11,76% |
| 3 | Tidak setuju | 2 | 11,76% |
| | Jumlah | 17 | 100% |

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 13 responden atau 76,47% yang menyatakan setuju tentang Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset melakukan pendaftaran dan pendataan jumlah wajib pajak dengan baik, terdapat 2 responden atau 11,76% yang menyatakan kurang setuju Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset melakukan pendaftaran dan pendataan jumlah wajib pajak

dengan baik, dan juga terdapat 2 responden atau 11,74% yang menyatakan tidak setuju pendaftaran dan pendataan dilakukan dengan baik oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu dari 13 responden yang menyatakan setuju Bapak Syaiful SP selaku Kasi Bidang Pendataan. “Beliau menyatakan setuju karena Dinas telah melakukan pendaftaran dan pendataan jumlah wajib pajak yang ada di Kabupaten Rokan Hulu khususnya pajak hotel dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada.” (Wawancara 2013)

Tabel 5.5 Tanggapan responden terhadap wajib pajak mengikuti prosedur pendaftaran dan pendataan dengan benar

| No | Jawaban responden | Frekuensi | Persentase % |
|----|-------------------|-----------|--------------|
| 1 | Setuju | 11 | 64,70 % |
| 2 | Kurang setuju | 6 | 35,29 % |
| 3 | Tidak setuju | - | - |
| | Jumlah | 17 | 100% |

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden terhadap wajib pajak yang mengikuti prosedur pendaftaran dan pendataan dengan benar bahwa terdapat 11 responden atau 64,70% yang menyatakan setuju, terdapat 6 responden atau sekitar 35,29% yang menyatakan kurang setuju, sedangkan yang mengatakan tidak setuju pada tabel ini tidak ada.

Berdasarkan wawancara penulis dengan responden yang menyatakan kurang setuju dapat disimpulkan bahwa wajib pajak kurang mengikuti proses pendaftaran dan pendataan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset. Karena

masih ada yang wajib pajak yang belum sadar mendaftarkan sendiri usahanya walaupun sudah 30 hari melakukan kegiatan usahanya tersebut.

Tabel 5.6 Tanggapan responden terhadap Dinas Pengelolaan Keuangan dan aset Memberikan sanksi terhadap wajib pajak hotel yang tidak mendaftarkan usahanya

| No | Jawaban responden | Frekuensi | Persentase % |
|----|-------------------|-----------|--------------|
| 1 | Setuju | 10 | 58,82% |
| 2 | Kurang setuju | 5 | 29,41% |
| 3 | Tidak setuju | 2 | 11,76% |
| | Jumlah | 17 | 100% |

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel di atas menggambarkan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak mendaftarkan usahanya, terdapat 10 responden atau 58,82% yang mengatakan setuju Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset telah memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak melaporkan usahanya, terdapat 5 responden atau 29,41% yang menyatakan kurang setuju dan 2 responden atau 11,76% yang menyatakan tidak setuju. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan responden yang menyatakan kurang setuju dapat di ambil kesimpulan bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan dan aset belum memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak mendaftarkan usahanya.(Wawancara 2013)

Tabel 5.7 Tanggapan responden terhadap kegiatan pencatatan data-data tentang wajib pajak hotel yang ada di Kabupaten Rokan Hulu sudah dilaksanakan

| No | Jawaban responden | Frekuensi | Persentase % |
|----|-------------------|-----------|--------------|
| 1 | Setuju | 13 | 76,47% |
| 2 | Kurang setuju | 3 | 17,64% |
| 3 | Tidak setuju | 1 | 5,88% |
| | Jumlah | 17 | 100% |

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui kegiatan pencatatan data-data wajib pajak yang ada di Kabupaten Rokan Hulu sudah dilakukan, terdapat 13 responden atau 76,47% yang menanggapi setuju, 3 responden atau 17,64% yang menanggapi kurang setuju dan terdapat 1 responden atau 5,88% menanggapi tidak setuju. Dari hasil wawancara dengan responden yang menyatakan setuju, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pencatatan tentang data-data wajib pajak yang di Kabupaten Rokan Hulu telah dilaksanakan. (Wawancara 2013)

Wawancara dengan salah satu pemilik hotel atau Penginapan Pasir Indah , Hj Hamlini mengatakan “bahwa pendaftaran telah dilakukan beliau sejak berdiri nya penginapan ini dan pihak dinas juga telah mendata termasuk jumlah kamar telah terdaftar di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu.” (Wawancara 2013)

Untuk lebih mengetahui rekapitulasi tanggapan responden terhadap pendaftaran dan pendataan pajak hotel, maka dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.8 Rekapitulasi Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Pendaftaran Dan Pendataan

| No | Tabel | Alternatif Jawaban | | | | | | Jumlah | |
|----|-----------|--------------------|--------|---------------|-------|--------------|-------|--------|------|
| | | Setuju | | Kurang Setuju | | Tidak Setuju | | | |
| | | F | % | F | % | F | % | F | % |
| 1 | 5.4 | 13 | 76,47 | 2 | 11,76 | 2 | 11,76 | 17 | 100% |
| 2 | 5.5 | 11 | 64,70 | 6 | 35,29 | - | - | 17 | 100% |
| 3 | 5.6 | 10 | 58,82 | 5 | 29,41 | 2 | 11,76 | 17 | 100% |
| 4 | 5.7 | 13 | 76,47 | 3 | 17,64 | 1 | 5,88 | 17 | 100% |
| | Jumlah | 47 | 276,46 | 16 | 94,1 | 5 | 29,4 | 68 | 400% |
| | Rata-rata | 12 | 69,11 | 4 | 23,52 | 1 | 7,35 | 17 | 100% |

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden tentang pendaftaran dan pendataan, terdapat 12 responden atau sekitar 69,11% menyatakan setuju pendaftaran dan pendataan sudah berjalan dengan baik, 4 responden atau sekitar 23,52% menyatakan kurang setuju karena pendaftaran dan pendataan berjalan masih kurang baik, dan terdapat 1 responden atau sekitar 7,35% menyatakan tidak setuju karena pendaftaran dan pendataan tidak berjalan dengan baik.

Dari hasil wawancara dengan Sandi Brahmadinata Nst, SE salah satu pegawai bidang Pendapatan Asli Daerah dapat disimpulkan “bahwa pendaftaran dan pendataan yang dilakukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan aset sudah berjalan baik, tetapi terkadang terjadi kesalahan petugas dalam memasukkan data-data wajib pajak, sehingga petugas harus mengkoreksi kembali data-data tersebut”(Wawancara 2013).

5.2.2 Penetapan Dan Pemungutan

Setiap pengusaha hotel (yang mejadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Pada beberapa daerah, penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah.

Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh bupati/walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD. Wajib pajak tetap memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak.

Untuk lebih mengetahui proses penetapan dan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Rokan Hulu, dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 5.9 Tanggapan responden terhadap Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset telah melakukan pemungutan pajak hotel dengan baik

| No | Jawaban responden | Frekuensi | Persentase % |
|----|-------------------|-----------|--------------|
| 1 | Setuju | 10 | 58,82% |
| 2 | Kurang setuju | 4 | 23,52% |
| 3 | Tidak setuju | 3 | 17,64% |
| | Jumlah | 17 | 100% |

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden tentang Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset melakukan pemungutan pajak hotel dengan baik, terdapat 10 responden atau 58,82% yang menanggapi setuju karena dinas pengelolaan Keuangan dan Aset melakukan pemungutan pajak dengan baik, terdapat 4 responden atau 23,52% yang menanggapi kurang setuju karena dinas pendapatan daerah kurang baik dalam melakukan proses pemungutan dan terdapat 3 responden atau 17,64% yang menanggapi tidak setuju. Dari tanggapan responden yang menyatakan kurang setuju tersebut memberikan alasan karena Dinas Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah kurang baik dalam melakukan pemungutan pajak hotel

Wawancara dengan salah satu pemilik hotel atau tepatnya pemilik Penginapan Gelora Bakti Bapak Syamsurizal, “ *Dinas atau kolektor yang datang selalu melakukan pemungutan pajak setiap bulannya, tapi terkadang mereka datang 1 kali 2 bulan untuk menjemput pajak hotel ini, dan kami selalu melakukan pembayaran sesuai dengan kewajiban atau 10 % dari hasil pendapatan atas pelayanan hotel yang kami berikan*” (Wawancara 2013).

Tabel 5.10 Tanggapan responden terhadap Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset telah melakukan penetapan target penerimaan pajak hotel dengan benar

| No | Jawaban responden | Frekuensi | Persentase % |
|----|-------------------|-----------|--------------|
| 1 | Setuju | 10 | 58,82% |
| 2 | Kurang setuju | 5 | 29,41% |
| 3 | Tidak setuju | 2 | 11,76% |
| | Jumlah | 17 | 100% |

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden tentang dinas pengelolaan keuangan dan aset melakukan penetapan target penerimaan pajak hotel dengan benar adalah terdapat 10 responden atau 58.82% menanggapi setuju penetapan target penerimaan pajak hotel dilakukan dengan benar, 5 responden atau 29,41% menanggapi kurang setuju dan terdapat 2 responden atau 11,76% menanggapi tidak setuju target penerimaan ditetapkan secara benar.

Wawancara dengan Kasi Penetapan dan Penagihan Bapak H. Emsar, S.sos mengatakan “bahwa penetapan target telah kami lakukan dengan benar sesuai dengan pendapatan pajak tahun sebelumnya, tapi terkadang terjadinya naik turun

pendapatan yang berasal dari pajak hotel ini di karenakan kurangnya jumlah pengunjung atau penyewa jasa hotel”(Wawancara 2013).

Tabel 5.11 Tanggapan responden terhadap target yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Terealisasi dengan maksimal

| No | Jawaban responden | Frekuensi | Persentase % |
|----|-------------------|-----------|--------------|
| 1 | Setuju | 12 | 70,58% |
| 2 | Kurang setuju | 4 | 23,52% |
| 3 | Tidak setuju | 1 | 5,88% |
| | Jumlah | 17 | 100% |

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel di atas tanggapan responden tentang target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terealisasi dengan maksimal, terdapat 12 responden atau sekitar 70,58% menyatakan setuju target yang ditetapkan terealisasi dengan maksimal, 4 responden atau sekitar 23,52% menyatakan kurang setuju target yang ditetapkan pemerintah terealisasi dengan maksimal, dan terdapat 1 responden atau 5,88% yang menyatakan tidak setuju. Berdasarkan wawancara dengan Kabid Pendapatan Asli Daerah Bapak Asri, SP mengatakan “Target sejauh ini masih bisa tercapai dengan maksimal karena target pajak hotel berpedoman terhadap pendapatan atau realisasi pajak tahun sebelumnya, dan sejauh ini masih bisa tercapai target tersebut” (Wawancara 2013).

Tabel 5.12 Tanggapan responden terhadap Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah kepada wajib pajak dengan baik

| No | Jawaban responden | Frekuensi | Persentase % |
|----|-------------------|-----------|--------------|
| 1 | Setuju | 11 | 64,70% |
| 2 | Kurang setuju | 4 | 23,52% |
| 3 | Tidak setuju | 2 | 11,76% |
| | Jumlah | 17 | 100% |

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel di atas tanggapan responden tentang Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset telah Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, terdapat 11 responden atau sekitar 64,17% menyatakan setuju target yang ditetapkan terealisasi dengan maksimal, 4 responden atau sekitar 23,52% menyatakan kurang setuju target yang ditetapkan pemerintah terealisasi dengan maksimal, dan terdapat 2 responden atau 51,76% yang menyatakan tidak setuju.

Untuk lebih mengetahui rekapitulasi tanggapan responden terhadap penetapan dan pemungutan pajak hotel, maka dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.13 Rekapitulasi Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Penetapan Dan Pemungutan

| No | Tabel | Alternatif Jawaban | | | | | | Jumlah | |
|----|-----------|--------------------|--------|---------------|-------|--------------|-------|--------|------|
| | | Setuju | | Kurang Setuju | | Tidak Setuju | | | |
| | | F | % | F | % | F | % | F | % |
| 1 | 5.9 | 10 | 58,82 | 4 | 23,52 | 3 | 17,64 | 17 | 100% |
| 2 | 5.10 | 10 | 58,82 | 5 | 29,41 | 2 | 11,76 | 17 | 100% |
| 3 | 5.11 | 12 | 70,58 | 4 | 23,52 | 1 | 5,88 | 17 | 100% |
| 4 | 5.12 | 11 | 64,70 | 4 | 23,52 | 2 | 11,76 | 17 | 100% |
| | Jumlah | 43 | 252,92 | 17 | 99,97 | 8 | 47,04 | 64 | 400% |
| | Rata-rata | 11 | 63,23 | 4 | 24,99 | 2 | 11,76 | 17 | 100% |

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden tentang penetapan dan pemungutan, terdapat 11 responden atau sekitar 63,23% menyatakan setuju penetapan dan pemungutan sudah berjalan dengan baik, 4 responden atau sekitar 24,99% menyatakan kurang setuju karena penetapan dan pemungutan berjalan masih kurang baik, dan terdapat 2 responden atau sekitar 11,76% menyatakan tidak setuju karena penetapan dan pemungutan tidak berjalan dengan baik.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Emsar, S.sos Kasi bidang Penetapan dapat disimpulkan “bahwa penetapan dan pemungutan yang dilakukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan aset sudah berjalan baik dan wajib pajak telah mau membayar pajak dan setiap bulannya dilakukan pemungutan”(wawancara 2013).

5.2.3 Penagihan

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Setiap wajib pajak hotel wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk lebih jelas mengenai penagihan pajak hotel di Kabupaten Rokan Hulu, maka dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 5.14 Tanggapan responden terhadap Sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal penagihan pajak hotel berjalan dengan baik.

| No | Jawaban responden | Frekuensi | Persentase % |
|----|-------------------|-----------|--------------|
| 1 | Setuju | 8 | 47,05% |
| 2 | Kurang setuju | 5 | 29,41% |
| 3 | Tidak setuju | 4 | 23,52% |
| | Jumlah | 17 | 100% |

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel di atas menggambarkan tanggapan responden tentang sistem dan prosedur pemungutan pajak berjalan dengan baik, terdapat 8 responden atau sekitar 47,05% yang menyatakan setuju terhadap pernyataan sistem dan prosedur pemungutan pajak berjalan dengan baik, terdapat 5 responden atau sekitar 29,41% menyatakan kurang setuju, sistem dan prosedur pemungutan pajak berjalan kurang baik, dan terdapat 4 responden atau sekitar 23,52% menyatakan tidak setuju.

Hasil wawancara penulis dengan responden yang menyatakan kurang setuju tersebut, dapat disimpulkan mereka menyatakan kurang setuju karena dalam prosedur pemungutan pajak hotel berjalan kurang baik disebabkan wajib pajak tidak mengikuti prosedur tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Wawancara 2013)

Tabel 5.15 Tanggapan responden terhadap Kolektor yang berwenang melakukan penagihan pajak hotel dengan benar

| No | Jawaban responden | Frekuensi | Persentase % |
|----|-------------------|-----------|--------------|
| 1 | Setuju | 9 | 52,94% |
| 2 | Kurang setuju | 6 | 35,29% |
| 3 | Tidak setuju | 2 | 11,76% |
| | Jumlah | 17 | 100% |

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel di atas diketahui tanggapan responden tentang kolektor yang berwenang, melakukan penagihan pajak hotel dengan benar, 9 responden atau sekitar 52,94% menanggapi setuju, penagihan pajak dilakukan oleh kolektor yang berwenang dengan benar, terdapat 6 responden atau sekitar 35,29% menyatakan kurang setuju kolektor melakukan penagihan pajak dengan benar, dan 2 responden atau sekitar 11,76% yang menyatakan tidak setuju karena kolektor tidak melakukan penagihan pajak dengan benar.

Wawancara dengan pemilik Penginapan Rokan Permai bapak Afrizal mengatakan “*bahwa kolektor yang datang dengan membawa SK setiap bulannya dan melakukan pemungutan pajak dan kami memberikan sebagaimana mestinya yang harus kami keluarkan yaitu 10%, dan kami sendiri yang melakukan penghitungan sendiri berapa yang harus kami bayar, dan pihak dinas hanya datang dan menerima pajak dan tidak kembali lagi, kalo tidak melakukan pemungutan pada bulan berikutnya*”.(wawancara 2013)

Tabel 5.16 Tanggapan responden terhadap Wajib pajak mengikuti prosedur pemungutan pajak dengan baik

| No | Jawaban responden | Frekuensi | Persentase % |
|----|-------------------|-----------|--------------|
| 1 | Setuju | 12 | 70,58% |
| 2 | Kurang setuju | 3 | 17,64% |
| 3 | Tidak setuju | 2 | 11,76% |
| | Jumlah | 17 | 100% |

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden tentang wajib pajak mengikuti prosedur pemungutan pajak dengan baik, terdapat 12 responden atau sekitar 70,58% menyatakan setuju karena wajib pajak mengikuti prosedur pemungutan pajak dengan baik, terdapat 3 responden atau sekitar 17,64% menyatakan kurang setuju karena wajib pajak kurang mengikuti prosedur pemungutan pajak, dan 2 responden atau sekitar 11,76% menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden yang menyatakan setuju tersebut maka dapat disimpulkan bahwa wajib pajak mengikuti prosedur pemungutan pajak dengan baik. Akan tetapi wajib pajak hotel masih ada yang kurang mengerti dengan prosedur pemungutan menurut responden yang menyatakan kurang setuju.

Tabel 5.17 Tanggapan responden terhadap Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak pada waktu tempo

| No | Jawaban responden | Frekuensi | Persentase % |
|----|-------------------|-----------|--------------|
| 1 | Setuju | 14 | 82,35% |
| 2 | Kurang setuju | 2 | 11,76% |
| 3 | Tidak setuju | 1 | 5,88% |
| | Jumlah | 17 | 100% |

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden tentang Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak pada waktu tempo, 14 responden atau sekitar 82,35% menyatakan setuju memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak pada waktu tempo, terdapat 2 responden atau sekitar 11,76% menyatakan kurang setuju terhadap pernyataan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak pada waktu tempo, dan 1 responden atau sekitar 5,88% menyatakan tidak setuju karena Dinas terkait tidak memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak pada waktu tempo. 14 responden yang menyatakan setuju karena dinas pengelolaan keuangan dan aset kabupaten Rokan Hulu memberikan sanksi kepada wajib pajak hotel.

Wawancara dengan pemilik Penginapan Putri Bungsu bapak Nirwan Sikumbang , beliau mengatakan apabila terjadi penunggakan pembayaran pajak, bisa melakukan permohonan pengangsuran atau penundaan dengan membuat surat permohonan secara tertulis kepada instansi terkait, dan apabila dikabulkan bias melakukan angsuran dengan di bebaskan bunga 2%.

Untuk lebih mengetahui rekapitulasi tanggapan responden terhadap penetapan dan pemungutan pajak hotel, maka dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.18 Rekapitulasi Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Penagihan pajak hotel

| No | Tabel | Alternatif Jawaban | | | | | | Jumlah | |
|----|-----------|--------------------|--------|---------------|-------|--------------|-------|--------|------|
| | | Setuju | | Kurang Setuju | | Tidak Setuju | | | |
| | | F | % | F | % | F | % | F | % |
| 1 | 5.12 | 8 | 47,05 | 5 | 29,41 | 4 | 23,52 | 17 | 100% |
| 2 | 5.13 | 9 | 52,94 | 6 | 35,29 | 2 | 11,76 | 17 | 100% |
| 3 | 5.14 | 12 | 70,58 | 3 | 17,64 | 2 | 11,76 | 17 | 100% |
| 4 | 5.15 | 14 | 82,35 | 2 | 11,76 | 1 | 5,88 | 17 | 100% |
| | Jumlah | 43 | 252,92 | 16 | 94,1 | 9 | 52,92 | 64 | 400% |
| | Rata-rata | 11 | 63,23 | 4 | 23,52 | 2 | 13,23 | 17 | 100% |

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden tentang penagihan pajak hotel di Kabupaten Rokan Hulu , terdapat 11 responden atau sekitar 63,23% menyatakan setuju penagihan pajak hotel di Kabupaten Rokan hulu sudah berjalan dengan baik, 4 responden atau sekitar 23,52% menyatakan kurang setuju karena penagihan pajak hotel berjalan masih kurang baik, dan terdapat 2 responden atau sekitar 13,23% menyatakan tidak setuju karena penagihan pajak hotel di Kabupaten Rokan Hulu tidak berjalan dengan baik.

5.2.4 Pembukuan Dan Pemeriksaan

Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harga, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahu pajak berakhir.

Kemudian wajib pajak hotel wajib melaporkan kepada bupati/ walikota, dalam praktik sehari-hari adalah kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan aset kabupaten/ kota, tentang perhitungan dan pembayaran pajak hotel yang terutang. Wajib pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan batas

waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan dalam peraturan daerah.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang pembukuan dan pemeriksaan pajak hotel di Kabupaten Rokan hulu, maka dapat di lihat pada jawaban responden di bawah ini:

Tabel 5.19 Tanggapan responden terhadap Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset selalu melakukan prosedur pembukuan dan pemeriksaan

| No | Jawaban responden | Frekuensi | Persentase % |
|----|-------------------|-----------|--------------|
| 1 | Setuju | 12 | 70,58% |
| 2 | Kurang setuju | 4 | 23,52% |
| 3 | Tidak setuju | 1 | 5,88% |
| | Jumlah | 17 | 100% |

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel di atas menggambarkan tanggapan responden tentang sistem dan prosedur pembukuan dan pemeriksaan dengan baik, terdapat 12 responden atau sekitar 70,58% yang menyatakan setuju terhadap pernyataan pembukuan dan pemeriksaan berjalan dengan baik, terdapat 4 responden atau sekitar 23,52% menyatakan kurang setuju, pembukuan dan pemeriksaan pajak berjalan kurang baik, dan terdapat 1 responden atau sekitar 5,88% menyatakan tidak setuju.

Tabel 5.20 Tanggapan responden terhadap wajib pajak hotel setiap tahunnya menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan

| No | Jawaban responden | Frekuensi | Persentase % |
|----|-------------------|-----------|--------------|
| 1 | Setuju | 10 | 58,82% |
| 2 | Kurang setuju | 5 | 29,41% |
| 3 | Tidak setuju | 2 | 11,76% |
| | Jumlah | 17 | 100% |

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden mengatakan wajib pajak hotel menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan setiap tahunnya terdapat 10 atau 58,82% setuju bahwa hotel telah melakukan pencatatan dengan baik, terdapat 5 atau 29,4%¹ mengatakan kurang setuju bahwa wajib pajak hotel melakukan pencatatan, serta terdapat 2 responden atau 11,76% mengatakan tidak setuju pihak wajib pajak telah melakukan pencatatan dan pembukuan pajak hotel dengan baik.

Wawancara dengan pengusaha hotel atau Penginapan Bahagia Hj. Murniati mengatakan “Setiap hotel telah memiliki pembukuan hotelnya tersendiri untuk menentukan omset dan bermanfaat dalam menentukan besar pajak yang akan di bayar mereka. Tetapi besar biaya yang akan di bayar oleh tiap wajib pajak tidak boleh dipublikasikan karena bersifat rahasia yang wajib dilindungi oleh Dinas karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Wawancara 2013)

Tabel 5.21 Tanggapan responden terhadap data fasilitas akomodasi hotel yang ada, sudah memenuhi kriteria pemungutan pajak hotel

| No | Jawaban responden | Frekuensi | Persentase % |
|----|-------------------|-----------|--------------|
| 1 | Setuju | 9 | 52,94% |
| 2 | Kurang setuju | 5 | 29,41% |
| 3 | Tidak setuju | 3 | 17,64% |
| | Jumlah | 17 | 100% |

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden tentang data fasilitas akomodasi hotel yang ada, sudah memenuhi kriteria pemungutan pajak hotel, terdapat 9 responden atau sekitar 52,94% menanggapi setuju karena data fasilitas akomodasi hotel yang ada sudah memenuhi kriteria pemungutan pajak hotel, 5 responden atau sekitar 29,41% menanggapi kurang setuju karena hotel yang ada di Kabupaten Rokan Hulu belum memenuhi kriteria pemungutan pajak hotel, dan terdapat 3 responden atau sekitar 17,64% menanggapi tidak setuju, karena data akomodasi hotel tidak memenuhi kriteria pemungutan pajak hotel.

Tabel 5.22 Tanggapan responden terhadap pejabat pemerintah kabupaten Rokan Hulu yang berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak

| No | Jawaban responden | Frekuensi | Persentase % |
|----|-------------------|-----------|--------------|
| 1 | Setuju | 8 | 47,05% |
| 2 | Kurang setuju | 5 | 29,41% |
| 3 | Tidak setuju | 4 | 23,52% |
| | Jumlah | | 100% |

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel diatas dapat di lihat tanggapan responden tentang pejabat pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak, 8 responden atau sekitar 47,05 menyatakan setuju, terdapat 5 responden atau sekitar 29,41% menyatakan kurang setuju karena pemerintah jarang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak, dan 4 responden atau sekitar 23,52% menyatakan tidak setuju karena Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tidak melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Dari pernyataan responden yang menjawab setuju memberikan alasan karena Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan pemeriksaan kepada tiap wajib pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak tersebut.

Tabel 5.23 Rekapitulasi Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Pembukuan dan pemeriksaan

| No | Tabel | Alternatif Jawaban | | | | | | Jumlah | |
|----|-----------|--------------------|--------|---------------|--------|--------------|-------|--------|------|
| | | Setuju | | Kurang Setuju | | Tidak Setuju | | | |
| | | F | % | F | % | F | % | F | % |
| 1 | 5.18 | 12 | 70,58 | 4 | 23,52 | 1 | 5,88 | 17 | 100% |
| 2 | 5.19 | 10 | 58,82 | 5 | 29,41 | 2 | 11,76 | 17 | 100% |
| 3 | 5.20 | 9 | 52,94 | 5 | 29,41 | 3 | 17,64 | 17 | 100% |
| 4 | 5.21 | 8 | 47,05 | 5 | 29,41 | 4 | 23,52 | 17 | 100% |
| | Jumlah | 39 | 229,39 | 19 | 111,75 | 10 | 58,8 | 64 | 400% |
| | Rata-rata | 10 | 57,34 | 5 | 27,93 | 2 | 14,7 | 17 | 100% |

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden tentang pembukuan dan pemeriksaan, terdapat 10 responden atau sekitar 57,34% menyatakan setuju pembukuan dan pemeriksaan di Kabupaten Rokan Hulu sudah berjalan dengan baik, 5 responden atau sekitar 27,93% menyatakan kurang setuju karena di Kabupaten Rokan Hulu pembukuan dan pemeriksaan masih berjalan kurang baik, dan terdapat 2 responden atau sekitar 14,7% menyatakan tidak setuju karena pembukuan dan pemeriksaan pajak hotel di Kabupaten Rokan Hulu tidak berjalan dengan baik.

5.2.4 Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pajak hotel kepada instansi yang kewenangannya sebagai pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah. Dalam melaksanakan nya dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain yang terkait yang berguna untuk menguji dan membuat wajib pajak membayar pajak sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui masalah pengwasan dan pengendalian terhadap wajib pajak hotel yang dilakukan oleh instansi terkait , bisa kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.24 Tanggapan responden terhadap Dinas Pengelolaan Keuangan dan aset Kabupaten Rokan Hulu selalu melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha perhotelan

| No | Jawaban responden | Frekuensi | Persentase % |
|----|-------------------|-----------|--------------|
| 1 | Setuju | 5 | 29,41% |
| 2 | Kurang setuju | 9 | 52,94% |
| 3 | Tidak setuju | 3 | 17,64% |
| | Jumlah | 17 | 100% |

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden tentang pengawasan terhadap jalannya usaha perhotelan, terdapat 5 responden atau sekitar 29,41% menyatakan setuju pengawasan jalannya usaha hotel di Kabupaten Rokan Hulu sudah berjalan dengan baik, 9 responden atau sekitar 52,94% menyatakan kurang setuju karena di Kabupaten Rokan Hulu pengawasan berjalan kurang baik, dan terdapat 3 responden atau sekitar 17,64% menyatakan tidak setuju karena pengawasan usaha perhotelan di Kabupaten Rokan Hulu tidak berjalan dengan baik.

Tabel 5.25 Tanggapan responden terhadap pengawasan terhadap wajib pajak dilakukan secara rutin oleh perangkat daerah yang berwenang

| No | Jawaban responden | Frekuensi | Persentase % |
|----|-------------------|-----------|--------------|
| 1 | Setuju | 4 | 23,52% |
| 2 | Kurang setuju | 8 | 47,05% |
| 3 | Tidak setuju | 5 | 29,41% |
| | Jumlah | 17 | 100% |

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden tentang pengawasan rutin, terdapat 4 responden atau sekitar 23,52% menyatakan setuju pejabat yang berwenang melakukan pengawasan secara rutin terhadap jalannya usaha hotel di Kabupaten Rokan Hulu sudah berjalan dengan baik, 8 responden atau sekitar 47,05% menyatakan kurang setuju karena di Kabupaten Rokan Hulu pengawasan rutin dilakukan berjalan kurang baik, dan terdapat 5 responden atau sekitar 29,41% menyatakan tidak setuju karena pengawasan usaha perhotelan di Kabupaten Rokan Hulu tidak berjalan dengan baik.

Tabel 5.26 Tanggapan responden terhadap dalam melaksanakan pengawasan perangkat daerah yang berwenang meminta keterangan dan bahan bukti kepada wajib pajak

| No | Jawaban responden | Frekuensi | Persentase % |
|----|-------------------|-----------|--------------|
| 1 | Setuju | 6 | 35,29% |
| 2 | Kurang setuju | 10 | 58,82% |
| 3 | Tidak setuju | 1 | 5,88% |
| | Jumlah | 17 | 100% |

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden tentang perangkat daerah meminta keterangan dan bahan bukti terhadap wajib pajak, terdapat 6 responden atau sekitar 35,29% menyatakan setuju meminta keterangan dan bahan bukti terhadap pemilik hotel di Kabupaten Rokan Hulu, 10 responden atau sekitar 58,82% menyatakan kurang setuju perangkat daerah yang berwenang meminta keterangan dan bahan bukti kepada wajib pajak dan terdapat 1 responden atau sekitar 5,88% menyatakan tidak setuju perangkat daerah meminta keterangan terhadap wajib pajak. Menurut salah satu responden pegawai bidang PAD Tengku Syahril “ *pihak dinas pengelolaan tidak pernah melakukan pengawasan karena setiap bulannya pajak hotel di jemput dan diminta langsung kepada wajib pajak, dan pihak dinas tidak ada lagi berkunjung kecuali penjemputan pajak pada bulan berikutnya.* (Wawancara 2013)

Tabel 5.27 Tanggapan responden terhadap dinas pengelolaan keuangan dan aset melakukan pengendalian terhadap wajib pajak agar selalu membayar utang pajak sesuai dengan surat tagihan pajak daerah(STPD)

| No | Jawaban responden | Frekuensi | Persentase % |
|----|-------------------|-----------|--------------|
| 1 | Setuju | 4 | 23,52% |
| 2 | Kurang setuju | 11 | 64,70% |
| 3 | Tidak setuju | 2 | 11,76% |
| | Jumlah | 17 | 100% |

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden tentang Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset mengendalikan pengendalian terhadap wajib pajak agar membayar pajak yang dibebankan kepadanya, terdapat 4

responden atau sekitar 23,52% menyatakan setuju bahwa dinas terkait melakukan pengendalian, 11 responden atau sekitar 64,70% menyatakan kurang setuju dinas melakukan pengendalian terhadap wajib pajak, dan terdapat 2 responden atau sekitar 11,76% menyatakan tidak setuju dinas melakukan pengendalian terhadap wajib pajak agar membayar utang pajak sesuai dengan surat tagihan pajak daerah.

Tabel 5.28 Rekapitulasi Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian

| No | Tabel | Alternatif Jawaban | | | | | | Jumlah | |
|----|-----------|--------------------|--------|---------------|--------|--------------|-------|--------|------|
| | | Setuju | | Kurang Setuju | | Tidak Setuju | | | |
| | | F | % | F | % | F | % | F | % |
| 1 | 5.23 | 5 | 29,41 | 9 | 52,94 | 3 | 17,64 | 17 | 100% |
| 2 | 5.24 | 4 | 23,52 | 8 | 47,05 | 5 | 29,41 | 17 | 100% |
| 3 | 5.25 | 6 | 35,29 | 10 | 58,82 | 1 | 5,88 | 17 | 100% |
| 4 | 5.26 | 4 | 23,52 | 11 | 64,70 | 2 | 11,76 | 17 | 100% |
| | Jumlah | 19 | 111,74 | 38 | 223,51 | 11 | 64,69 | 64 | 400% |
| | Rata-rata | 5 | 27,93 | 9 | 55,87 | 3 | 16,17 | 17 | 100% |

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden tentang pengawasan dan pengendalian, terdapat 5 responden atau sekitar 27,93% menyatakan setuju pengawasan dan pengendalian di Kabupaten Rokan Hulu berjalan dengan baik, 9 responden atau sekitar 55,87% menyatakan kurang setuju karena di Kabupaten Rokan Hulu pengawasan dan pengendalian berjalan kurang baik, dan terdapat 3 responden atau sekitar 14,7% menyatakan tidak setuju karena pengawasan dan pengendalian terhadap wajib pajak hotel di Kabupaten Rokan Hulu tidak berjalan dengan baik.

Wawancara dengan beberapa pengusaha Hotel yang ada di Pasir Pengaraian kabuapten Rokan Hulu, mereka mengatakan Instansi terkait tidak pernah melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha perhotelan,karena dinas telah memberikan wewenang sepenuhnya kepada pengusaha hotel untuk

menghitung dan menyampaikan besarnya pajak terutang dan membayar pajak pada setiap bulannya, maka karena itu instansi tidak pernah melakukan pengawasan sejauh pengetahuan pemilik hotel. (Wawancara 2013)

Untuk lebih jelas mengenai tanggapan responden terhadap pendaftaran dan pendataan, penetapan dan pemungutan, penagihan, pembukuan dan pemeriksaan serta pengawasan dan pengendalian pajak hotel di Kabupaten Rokan Hulu, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.29 Rekapitulasi Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Pendaftaran Dan Pendataan, Penetapan Dan Pemungutan, Penagihan, Pembukuan Dan Pemeriksaan dan Pengawasan dan Pengendalian

| No | Tabel | Alternatif Jawaban | | | | | | Jumlah | |
|----|---|--------------------|--------|---------------|--------|--------------|-------|--------|------|
| | | Setuju | | Kurang Setuju | | Tidak Setuju | | | |
| | | F | % | F | % | F | % | F | % |
| 1 | Pendaftaran dan Pendataan | 12 | 69,11 | 4 | 23,52 | 1 | 7,35 | 17 | 100% |
| 2 | Penetapan dan Pemungutan | 11 | 63,23 | 4 | 24,99 | 2 | 11,76 | 17 | 100% |
| 3 | Penagihan | 11 | 63,23 | 4 | 23,52 | 2 | 13,23 | 17 | 100% |
| 4 | Pembukuan dan Pemeriksaan | 10 | 57,34 | 5 | 27,93 | 2 | 14,7` | 17 | 100% |
| 5 | Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian | 5 | 27,93 | 9 | 55,87 | 3 | 16,17 | 17 | 100% |
| | Jumlah | 49 | 280,84 | 26 | 155,83 | 10 | 63,21 | 68 | 100% |
| | Rata-rata | 10 | 56,16 | 5 | 31,16 | 2 | 12,64 | 17 | 100% |

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Berdasarkan tabel 5.28 dapat di lihat tanggapan responden terhadap prosedur penerimaan pajak hotel di Kabupaten Rokan Hulu, terdapat 10 responden atau 56,16% menyatakan setuju dalam penerimaan pajak hotel di Kabupaten Rokan Hulu sudah berjalan efektif. Dan sebanyak 5 responden atau sekitar 31,16% menyatakan kurang setuju, karena penerimaan pajak hotel pada

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan hulu berjalan kurang efektif, sedangkan 2 responden atau 12,64% menyatakan tidak setuju dalam penerimaan pajak hotel di Kabupaten Rokan Hulu tidak efektif. Maka dari tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan penerimaan pajak hotel pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu telah efektif, dengan persentase 56,16%.

Dari Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu No 26 Tahun 2011 tentang sistem pemungutan pajak hotel terlihat dari lima indikator bahwa pendaftaran pendataan merupakan yang terbaik d jalankan oleh dinas dalam pemungutan pajak hotel ini dengan persentase responden 69,11% yg menjawab setuju bahwa pendaftaran dan pendataan telah dilakukan terhadap wajib pajak hotel. Sedangkan indikator yang paling rendah pada pemungutan pajak hotel ini adalah pengawasan dan pengendalian dengan persentase 55,87% responden yg menyatakan kurang setuju pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan baik,karena realisasi nya di lapangan masih rendah.

Wawancara dengan Kabid PAD , mengatakan bahwa sistem prosedur pemungutan telah dilakukan dengan baik ,tetapi terkadang pembayaran pajak hotel yang dilakukan wajib pajak grafiknya naik turun,dan mengakibatkan terjadinya pluktuasi,atau naik turunnya pendapatan pajak dari sektor hotel. (Wawancara 2013)

Wawancara hasil penelitian terhadap Bapak Asri selaku kepala bidang pendapatan asli daerah, beliau mengatakan system prosedur pemungutan pajak hotel sesuai Peraturan Bupati No 26 tentang pemungutan pajak hotel telah

dilakukan,akan tetapi masih ada kendala pada pengawasan dan pengendalian. Pihak dinas belum bisa mengawasi sepenuhnya jalan usaha perhotelan dimana pajak yang ada di Kabupaten Rokan Hulu ada 10 item yang harus di jemput setiap bulannya,se sedangkan pihak dinas yang turun kelapangan atau jemput bola hanya 6 sampai 7 orang, sehingga Sumber Daya manusia jumlahnya di bidang Pendapatan Asli Daerah ini sangat kurang memadai. (Wawancara 2013)

Wawancara dengan orang yang sama bapak Asri selaku kepala bidang pendapatan asli daerah dinas pengelolaan keuangan dan aset mengatakan pada tahun 2010 memang terjadi penurunan yang drastis penerimaan pajak hotel dimana target penerimaan Rp 450.000.000 , sedangkan realisasinya Rp 204.500.570 atau persentase 48,12%. Pada tahun 2010 pihak dinas yang melakukan pemungutan tidak bisa maksimal karena masih berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi, sedangkan Peraturan Daerah No 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati No 26 tahun 2011 tentang pemungutan pajak hotel belum ada. Kemudian pihak dinas juga tidak menerapkan besar beban pajak 10% dari penghasilan atau pendapatan hotel. Pihak dinas di tahun 2010 baru melakukan sosialisasi pemungutan pajak hotel bertarifkan 10% , akan tetapi mendapat perlawanan pasif dari pihak wajib pajak,karena system perpajakan yang sulit di pahami masyarakat. Dan pada akhirnya pemungutan dilakukan seadanya,berapa mereka sanggup bayar pada bulan dilakukan pemungutan ,maka itu pendapatan yang diterima pada bulan itu dari sektor pajak hotel.

Wawancara dengan Humas dari Hotel Sapadia Rohul, mengatakan pajak yang di bayar telah sesuai dengan kewajiban yang di bayar, yaitu 10 % dari hasil pendapatan jasa hotel yang diberikan, akan tetapi terkadang jumlah pengunjung dan penyewa gedung hotel grafiknya kadang naik kadang turun, sehingga pajak dikeluarkan pada setiap bulannya tidak stabil.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu tentang analisis penerimaan pajak hotel, maka penulis mengambil kesimpulan dan saran-saran dari keseluruhan uraian dan penjelasan tentang prosedur pemungutan pajak hotel sesuai peraturan daerah No 01 tentang sistem pemungutan pajak hotel .

1. Pendaftaran dan pendataan yang dilakukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan aset terhadap hotel yang ada di kabupaten rokan hulu ternyata telah berjalan dengan baik dengan persentase responden menjawab mencapai 69,11%, atau ini menunjukkan pendaftaran dan pendataan telah dilakukan oleh dinas terkait.
2. Penetapan dan pemungutan yang dilakukan oleh dinas juga telah maksimal dan mampu membantahkan hipotesis penulis sebelumnya yang mengatakan terjadinya kenaikan dan penurunan pajak hotel sebelumnya karena belum berjalannya dengan baik sistem pemungutan yang telah ditetapkan peraturan daerah tentang pemungutan pajak hotel, jawaban responden pada penetapan dan pemungutan pajak ini yang mengatakan sudah berjalan dengan baik mencapai 63,23%.
3. Penagihan pajak oleh dinas terkait ataupun kolektor yang ditunjuk juga telah melaksanakan tugasnya dengan mendatangi wajib pajak setiap

bulannya dan melakukan pemungutan pajak, karena responden menjawab 63,23% setuju bahwa penagihan telah dilakukan dan menyatakan pihak wajib pajak melakukan pembayaran pajak hotelnya kepada petugas.

4. Pembukuan dan pemeriksaan dilakukan oleh dinas terkait dan setelah melakukan wawancara dengan pihak wajib pajak juga melakukan pembukuan sebagai bukti, pedoman dan arsip apabila diperlukan, untuk pembukuan dan pemeriksaan ini responden mengatakan setuju bahwa pembukuan dan pemeriksaan telah dilakukan dengan baik dan persentasenya 57,34%.
5. Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu kurang begitu efektif karena telah memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menyampaikan dan menghitung sendiri besar pajak terutang dengan memakai sistem self assessment sehingga dinas terkait kurang ataupun tidak pernah melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha perhotelan, sehingga persentase dari responden mengatakan kurang setuju dilakukannya pengawasan dan pengendalian ini mencapai 55,87%.

6.2 Saran

Dari kesimpulan yang diuraikan diatas, maka disini penulis akan memberikan saran kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu maupun jajaran yang terkait untuk meningkatkan pendapatan pajak hotel di Kabupaten Rokan Hulu, agar kedepannya penerimaan pajak hotel bertambah lebih baik. Adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Dari penelitian yang dilakukan 4(empat) dari 5(lima) sistem prosedur pajak telah berjalan dengan baik, dan penulis memberikan saran agar dinas terkait mempertahankan serta melakukan pengecekan ulang ke lapangan untuk melihat keadaan dari usaha perhotelan dan kembali melakukan pendataan agar jumlah kamar maupun fasilitas yang ada pada setiap hotel yang bertambah dapat terdata kembali.
2. Dari lima indikator sistem pemungutan pajak pengawasan masih sangat rendah , sehingga perlu ditingkatkan agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan wajib pajak.
3. Dari penelitian yang dilakukan , maka penulis memberikan saran kepada dinas terkait agar mempertahankan bahkan meningkatkan pendapatan pajak hotel pada setiap tahunnya agar tidak terjadinya pluktuasi atau penaikan dan penurunan, sehingga pajak hotel mampu memberikan kontribusi lebih untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal , 2009, *Administrasi Keuangan Negara Dan Daerah*. UIN SUSKA.
- Diana, Anastasia. 2009. *Perpajakan Indonesia : Konsep, Aplikasi Dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Andi
- Devano, Sony & Rahayu, Siti kurnia, 2006, *Perpajakan: Konsep, Teori, Isu*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ilyas & Burton. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta : ANDI
- Pandiangan, Liberty. 2002. *Undang-Undang Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Rahayu, Siti kurnia & Eli Suhayati, 2010, *Perpajakan : Teori dan Teknis Perhitungan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rosdiana & Tarigan. 2005. *Perpajakan: Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Setiawan & Masri. 2006. *Perpajakan Umum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Siahaan, MP. 2005. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Grafindo Persada
- Skripsi Marzan. 2007. *Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu*
- Skripsi Sulastri. 2008. *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dalam meningkatkan PAD pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru*
- Suandy, Erly.2011. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat
- Sugiono.2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Sujatno, Bambang. 2008. *Hotel Courtesy*. Yogyakarta : ANDI
- Waluyo,2011,*Perpajakan Indonesia*, Jakarta :Salemba Empat
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah